

# PENYULUHAN KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA



**AHMAD SYAEKHU**

# **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

## **NOMOR 28 TAHUN 2014**

### **TENTANG HAK CIPTA**

#### **PASAL 113**

#### **KETENTUAN PIDANA**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)



**Penerbit  
Kesuma Jaya**

**PENYULUHAN KB DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA  
SEJAHTERA**

**Ahmad Syaekhu**

**Judul** : **Penyuluhan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera**  
**Penulis** : **Ahmad Syaekhu**

Hak Cipta ©2018 pada penulis.

Hak penerbitan pada Penerbit Kesuma Jaya. Bagi mereka yang ingin memperbanyak sebagian isi buku ini dalam bentuk atau cara apapun harus mendapat izin tertulis dari penulis dan Penerbit Kesuma Jaya.

Penyunting : Agusalim Juhari  
Perancang Sampul : Aji Musaji  
Penata Letak : Agusalim Juhari  
Isi : Sepenuhnya tanggung jawab penulis

Diterbitkan Oleh:

**PENERBIT KESUMA JAYA**

ISBN 978-602-51585-0-6

Cetakan Pertama, Maret 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

*All Rights Reserved*

---

**Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)**

---

Syaekhu, Ahmad

**Penyuluhan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera/Ahmad Syaekhu:**

-- cetakan I

-- Makassar: Penerbit Kesuma Jaya, 2018

viii + 106 hal.; 14,8 x 21 cm

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan petunjuknya serta karuniaNya, sehingga buku (diktat) yang sederhana ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Buku ini disusun terutama dimaksudkan untuk sebagai bahan rujukan atau referensi dalam membantu memenuhi kebutuhan bahan-bahan kuliah bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sawerigading Makassar.

Dengan terbitnya buku ini, dapat memberikan kemudahan dan nilai tambah terhadap kelancaran proses belajar mengajar dan berorientasi kepada kegiatan individu dan kelompok yang belajar bagaimana belajar secara efektif dan

efisien. Disamping itu juga buku ini merupakan salah satu bagian dari usaha untuk memperkaya kompetensi mahasiswa.

Kami sadar sepenuhnya bahwa buku ini masih banyak kekurangan-kekurangannya baik isi maupun teknis penulisannya. Untuk itu, kami tetap mengharapkan kesediaan pembaca kiranya dapat memberikan saran, petunjuk-petunjuk bahkan kritikan-kritikan yang konstruktif sebagai bahan masukan yang sangat berguna bagi kesempurnaan buku ini diwaktu-waktu mendatang.

Dalam penerbitan yang pertama ini, kami sampaikan terimah kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat langsung maupun yang memberi sumbangsi saran, sehingga buku yang sederhana ini dapat diterbitkan.

Semoga buku ini bermanfaat bagi sesama.

**Makassar,     Maret 2018**

**Ahmad Syaekhu**

# DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
BAGIAN PERTAMA: LATAR BELAKANG .....	1
BAGIAN KEDUA: GAMBARAN UMUM TENTANG PENYULUHAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Penyuluhan dan Kesejahteraan Keluarga.....	7
B. Gerakan KB Sebagai Bagian Dari Integral Program Pembangunan. ....	20
C. Pentingnya Intensitas Penyuluhan Keluarga Berencana Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga .....	27

BAGIAN KETIGA: INTENSITAS PELAKSANAAN PENYULUHAN KB.....	67
A. Intensitas Penyuluhan.....	67
B. Pendukung Pelaksanaan Keluarga Berencana.....	69
C. Peningkatan Kesejahteraan.....	78
D. Hubungan Penyuluhan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.....	80
Daftar Pustaka .....	99
Riwayat Hidup Penulis.....	105

# **BAGIAN PERTAMA**

## **LATAR BELAKANG**

**P**etugas Lapangan Keluarga Berencana adalah petugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan jajaran terdepan yang secara langsung berintraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu PLKB (Petugas lapangan Keluarga Berencana) berada dalam posisi kunci dalam Gerakan Keluarga Berencana Nasional yang sangat strategis.

Atas dasar ini sehingga seorang Petugas Lapangan Keluarga Berencana, bertugas melaksanakan penyuluhan secara intensif tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Keluarga pada masyarakat di mana PLKB tersebut menjadi lokasi binaan, dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa pembentukan Negara Kesatuan Republik

Indonesia bertujuan antara lain, untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.

Dalam rangka usaha memajukan kesejahteraan umum diatas telah dilakukan berbagai kegiatan disegala bidang agar terus meningkat termasuk usaha untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan yang telah dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ), sehingga Gerakan Keluarga Berencana ini merupakan salah satu program yang harus disukseskan.

Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 ditegaskan pula bahwa; agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terlaksana dengan cepat, harus dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui Gerakan Keluarga Berencana yang mutlak harus dilaksanakan dengan berhasil, karena kegagalan pelaksanaan Keluarga Berencana akan mengakibatkan hasil usaha pembangunan menjadi tidak berarti dan dapat membahayakan generasi yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya sebatas pada permasalahan pembangunan keluarga

berencana dan keluarga sejahtera saja namun juga menyangkut permasalahan pengendalian kependudukan.

Dari pernyataan tersebut, jelas tergambar bahwa kesadaran Bangsa Indonesia terhadap perlunya mengatasi masalah kependudukan guna menunjang keberhasilan usaha-usaha pembangunan nasional cukup tinggi, dan salah satu kegiatan yang memegang peranan penting dalam mengatasi masalah tersebut adalah melalui kegiatan Gerakan Keluarga Berencana.

Bertolak dari pemikiran tersebut dapat dilihat secara jelas bahwa tujuan Gerakan Keluarga Berencana adalah memujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang merupakan sumber daya manusia dengan mengendalikan kelahiran dalam rangka menjamin pertumbuhan penduduk Indonesia. Dengan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera ini diharapkan pola tingkah laku fertilitas di tiap-tiap keluarga yang menguntungkan bagi penendalian jumlah kelahiran masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka penggarapan Gerakan Keluarga Berencana Nasional pada dua bentuk sasaran yakni sasaran langsung yaitu para pasangan usia subur dengan jalan secara bertahap agar mereka menjadi peserta keluarga berencana yang aktif sehingga memberikan efek langsung penurunan fertilitas. Sasaran tidak langsung,

organisasi-organisasi / Lembaga-lembaga kemasyarakatan, instansi-instansi pemerintahan maupun swasta, tokoh-tokoh masyarakat yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap proses pembentukan sistem nilai dikalangan masyarakat yang dapat mendukung usaha perlembagaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin menegaskan kewenangan tersebut, di mana pada lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang, Pembagian Urusan Pemerintahan konkrit antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota pada huruf N (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) menegaskan kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Empat sub urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan perintah yaitu; 1) sub urusan pengendalian penduduk, 2) sub urusan keluarga berencana, 3) sub urusan keluarga sejahtera, dan 4) sub urusan sertifikasi dan standarisasi.

Lebih lanjut keterkaitan dengan arah Kebijakan Pembangunan Nasional Pemeintah periode 2015 – 2019, BKKBN diberikan mandate untuk dapat turut mensukseskan

Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada agenda prioritas nomor 5 (lima) “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015 – 2019 (Dimensi Pembangunan) untuk dimensi pembangunan manusia pada pembangunan bidang kesehatan dan mental/karakter (Revolusi Mental).

Landasan hukum, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan Pembangunan Pemerintahan 2015 – 2019 diatas kemudian dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Strategi (Renstra) BKKBN tahun 2015 -2019, dengan 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan ; 1). Menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tingkat nasional (persen per tahun) dari 1,38 persen tahun 2015 menjadi 1,21 persen/pertahun 2019, 2). Menurunnya Total Fertility Rate (TFR), perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019, 3). Meningkatnya Contraceptive Prevalance Rate (CPR) semua metode dari 65,2 persen menjadi 66 persen, 4). Menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari jumlah pasangan usia subur (persen) dari 10,6 persen dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019, 5). Menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) dari 46 (pada tahun 2015) menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok umur 15 – 19 tahun

pada tahun 2019, 6). Menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari wanita usia subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen tahun 2019.

Upaya pencapaian 6 (enam) sasaran strategis diatas, BKKBN harus dapat melaksanakan berbagai langkah penguatan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang benar-benar memiliki daya dorong terhadap upaya pencapaian target/sasaran, serta penguatan kegiatan-kegiatan prioritas secara komprehensif dan berkelanjutan diseluruh tingkat wilayah. Selain itu, BKKBN juga harus memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan berbagai permasalahan program yang harus dihadapi saat ini.

## **BAGIAN KEDUA**

### GAMBARAN UMUM TENTANG PENYULUHAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyuluhan Dan Kesejahteraan Keluarga**

##### 1. Tentang Penyuluhan

Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku dikalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya. Dalam perkembangannya pengertian tentang penyuluhan tidak sekedar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah (one way) dan pasif tetapi penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan disuluh agar terbangun proses perubahan "perilaku" (behavior) yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang/pihak

lain baik secara langsung (berupa ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya). Dengan kata lain penyuluhan tidak berhenti pada penyebar-luasan informasi/inovasi dan memberikan penerangan tetapi merupakan proses yang dilakukan terus menerus, sekuat tenaga dan pikiran, memakan waktu dan melelahkan, sampai penerima manfaat penyuluhan (beneficiaries) yang menjadi klien penyuluhan. Penyuluhan mempunyai arti dan maksud memberi informasi, penerangan atau nasehat yang diperlukan dalam bidang keluarga berencana di mana proses pendekatan dalam penyuluhan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tjondronegoro bahwa Penyuluhan adalah usaha pendidikan non forma yang merupakan perpaduan dari kegiatan menggugah minat / keinginan, menimbulkan swadaya masyarakat menyebarkan pengetahuan / ketrampilan dan kecakapan sehingga diharapkan terjadinya perubahan perilaku, dan pengetahuan). (Endang Sastra Atmadja ; Penyuluhan Pertanian, 1993).

Penyuluhan sebagai proses pendidikan atau proses belajar diartikan bahwa, kegiatan penyebar-luasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui proses pendidikan atau kegiatan belajar, artinya perubahan perilaku yang

terjadi/dilakukan oleh sasaran tersebut berlangsung melalui proses belajar. Hal ini penting untuk dipahami, karena perubahan perilaku dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti, pembujukan, pemberian intensif/hadiah, atau bahkan melalui kegiatan –kegiatan pemaksaan (baik melalui penciptaan kondisi lingkungan fisik maupun social ekonomi, maupun pemaksaan melalui aturan dan ancaman-ancaman). Berbeda dengan perubahan perilaku yang dilakukan bukan melalui pendidikan, perubahan perilaku melalui proses belajar biasanya berlangsung lebih lambat, tetapi perubahannya relatif lebih kekal. Perubahan seperti itu, baru akan meluntur kembali manakala ada pengganti atau sesuatu yang dapat menggantikannya, yang memiliki keunggulan-keunggulan yang baru yang diyakini memiliki manfaat lebih, baik secara ekonomi maupun non ekonomi. Lain halnya dengan perubahan perilaku yang terjadi karena bujukan/hadiah atau pemaksaan, perubahan tersebut biasanya dapat terjadi dalam waktu relatif singkat, tetapi lebih cepat meluntur, yaitu jika bujukan/hadiah/pemaksaan tersebut dihentikan, berhenti atau tidak mampu lagi melanggengkan kegiatan

Claar et al, (1984), membuat rumusan bahwa penyuluhan merupakan jenis khusus pendidikan pemecahan masalah (problem solving) yang berorientasi pada tindakan, yang mengajarkan sesuatu, mendemonstrasikan, dan

memotivasi tapi tidak melakukan pengaturan (regulation) dan juga tidak melaksanakan program yang non edukatif.

SDC (1995) menyatakan bahwa, penyuluhan tidak sekedar merupakan proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi merupakan proses perubahan sosial, yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan perubahan sosial disini adalah, tidak saja perubahan (perilaku) yang berlangsung pada diri seseorang, tetapi juga perubahan-perubahan hubungan antar individu-individu dalam masyarakat, termasuk struktur sosialnya.

Sejalan dengan pemahaman tentang penyuluhan sebagai proses perubahan sosial yang dikemukakan diatas, penyuluhan juga sering disebut sebagai proses rekayasa sosial (social engineering) atau segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam system sosialnya masing-masing. Karena kegiatan rekayasa sosial dilakukan oleh pihak luar, maka rekayasa sosial bertujuan untuk terwujudnya proses perubahan sosial demi terciptanya kondisi sosial yang diinginkan oleh pihak luar (perekayasa), pemahaman seperti itu tidak salah

tetapi tidak dapat sepenuhnya dapat diterima, sebab rekayasa sosial yang pada dasarnya dimaksud untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan kelompok sasarannya, seringkali dapat berakibat negatif, mankalah hanya mengacu kepada kepentingan perekayasa, sementara masyarakat dijadikan korban pemenuhan kehendak perekayasa.

Penyuluhan sebagai proses pemasaran (social marketing) adalah penerapan konsep dan atau teori-teori pemasaran dalam proses perubahan sosial. Berbeda dengan rekayasa sosial yang lebih berkonotasi membentuk (to do to) atau menjadikan masyarakat menjadi sesuatu yang baru sesuai yang dikehendaki oleh perekayasa, proses pemasaran sosial dimaksudkan untuk menawarkan (to do for) sesuatu kepada masyarakat. Jika dalam rekayasa sosial proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan perekayasa, pengambilan keputusan dalam pemasaran sosial sepenuhnya berada di tangan masyarakat itu sendiri.

Penyuluhan berasal dari kata "suluh" yang berarti obor atau pelita atau yang member terang, dengan penyuluhan di harapkan terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari yang tidak mampu menjadi mampu melaksanakan suatu pekerjaan yang bermanfaat. Sikap dikatakan meningkat, bila terjadi perubahan dari yang tidak mau menjadi

mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan,  
( source:Ibrahim,et al, 2003:1-2)

Berdasarkan hal tersebut diatas diperjelas bahwa dalam Gerakan Keluarga Berencana ada aktivitas khusus yang menangani masalah penyuluhan keluarga berencana umumnya yang di sebut Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) yang ertugas ditingkat Desa/Kelurahan.

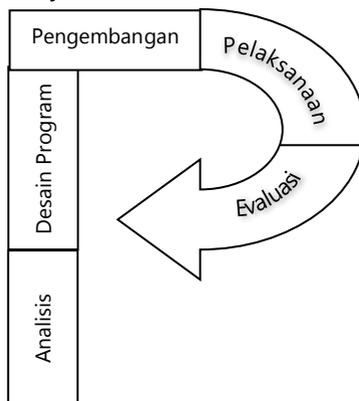
Agar PLKB tersebut dapat melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka seorang PLKB harus mematuhi langkah-langkah kerja secara sistimatis agar tugas dan kewajibannya dapat berjalan lancar sesuai tujuan.

Disamping penyuluhan menurut PLKB juga diterapkan pola KIE-KB, merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan proses penyampaiaan dan penerimaan informasi tentang KB dan aspek-aspeknya dalam rangka meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan pola prilaku masyarakat sehubungan dengan Gerakan KB Nasional, sehingga tercipta suatu masyarkat yang bertanggung jawab dalam bentuk NKKBS (BKKBN, 1991)

Kegiatan ini pada kenyataannya searah dengan “teori tindakan bernalar” (the reasoned- action theory) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen dalam bukunya yang berjudul Understanding Attitude and Prediction Behavior.

Dalam teori mereka, dikatakan bahwa perilaku (behavior) seorang sangat tergantung pada sikap (attitude) dan norma subyektif (subyektif normn) atas perilaku tadi. Pada bagian lain, keyakinan (believing) atas perilaku tadi pengaruh terhadap sikap dan norma subyektif tadi (Fishbien dan Ajzen, 1980). Dalam buku yang lain, yaitu believe, attitude, intention and behavior, dikatakan bahwa keyakinan (belief) menunjukkan informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu subyek (Fishbein dan Ajzen, 1975). Dari informs inilah selanjutnya sikap (penilaian atas suatu obyek sebagai sesuatu yang menguntungkan atau tidak) muncul.

Berbagai informasi yang diterima dan terkumpul pada diri seseorang ini selanjutnya membentuk pengetahuan, disamping aspek KIE tersebut juga dikenal suatu proses pengembangan KIE dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dengan mengikuti 5 langkah yang tercakup dalam prose "P" (Prof.DR.David K.Barlo) yaitu ;



Tahapan-tahapan yang dilalui proses ini meliputi

- 1) Program Analisis, kemudian disusul perencanaan desain program penyuluhan
- 2) Selanjutnya dalam taraf tertentu dilakukan pengembangan sesuai tahap yang dicapai program.
- 3) Diikuti dengan pelaksanaan kegiatan lapangan yang diselenggarakan secara komprehensif.
- 4) Dan diikuti dengan instrument evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan program yang telah direncanakan.

## 2. Tentang Kesejahteraan Keluarga

Membahas tentang kesejahteraan keluarga secara lebih jelas dapat dirinci dalam uraian sebagai berikut :

- a. Pengertian Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri, atau suami- istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
- b. Sejahtera adalah keadaan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiria dan kepauasaan bathinia.
- c. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

- d. Kualitas Keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
- e. Kemandirian Keluarga adalah sikap mental dalam berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pembangunan mendewasakan usia perkawinan, membina dan meningkatkan ketahanan keluarga, mengatur kelahiran dan mengembangkan kualitas dan kesejahteraan keluarga, berdasar kesadaran dan tanggung jawab.
- f. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik –material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
- g. Norma Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin.

- h. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimunnya.
- i. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimunya dalam hal sandang, pangan, dan pelayanankesehatan yang sangat dasar , namun belum dapat memehuni kebutuhan sosial-psikologisnya.

Dari batasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

Namun demikian pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana, kegiatan ini dirinci dalam berbagai tahapan keluarga sejahtera, untuk memudahkan melihat klasifikasi kesejahteraan dari tiap-tiap keluarga tersebut. Pertahanan keluarga sejahtera yang dimaksud dalam pelaksanaan Gerakan KB adalah sebagai berikut dilihat dari segi tahapan pencapaian tingkat kejehteraannya, dikelompokkan atas lima tahap yaitu :

- a. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya

- (basic need) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
- b. Keluarga Sejahtera Tahap I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (socio psychological), seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
  - c. Keluarga Sejahtera Tahap II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan Sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi, dan kebutuhan perkembangannya (developmental needs).
  - d. Keluarga Sejahtera Tahap III, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, kebutuhan sosial psikologisnya, dan kebutuhan perkembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat.

Seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atau yayasan sosial,kegamaan, kesenian, dan pendidikan.

- e. Keluarga Sejahtera Tahap III plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan baik yang bersifat dasar, sosial psykologis, maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berklanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan tahapan keluarga sejahtera tersebut diatas, untuk uraian selanjutnya agar lebih jelas dibawah ini akan dikemukakan indikator-indikator dari tiap-tiap pentahapan tersebut yaitu meliputi :

- a. Tahapan Pra Sejahtera

Adalah keluarga yang belum memenuhi salah satu atau lebih, indicator-indikator keluarga sejahtera tahap I

- b. Keluarga Sejahtera Tahap I

Memenuhi indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Makan dua kali sehari atau lebih
- 2) Pakaiaan yang berbeda untuk berbagai keperluan
- 3) Papan (lantai bukan dari tanah)
- 4) Kesehatan (anak Sakit dibawah kesarana/kesehatan)

- c. Keluarga Sejahtera Tahap II

Seluruh indikator keluarga sejahtera I, terpenuhi ditambah indikator

- 1) Makan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk, paling kurang sekali dalam seminggu
- 2) Luas lantai tiap penghuni rumah 8 m
- 3) Memperoleh pakaian baru dalam satu tahun terakhir
- 4) Bisa baca tulis latin bagi seluruh anggota keluarga dewasa yang berusia di bawah 60 tahun
- 5) Anak usia sekolah (6 tahun sampai 15 tahun) bersekolah
- 6) Keluarga mempunyai penghasilan tetap
- 7) Anggota keluarga sehat dalam sebulan terakhir sehingga dapat melaksanakan fungsi masing-masing
- 8) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama masing-masing

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Seluruh indikator keluarga sejahtera tahap II terpenuhi ditambah indikator :

- 1) Anak yang hidup paling banyak dua orang, bila lebih dari dua orang, orang tua yang masih PUS memakai kontrasepsi
- 2) Keluarga mempunyai tabungan
- 3) Makan bersama paling kurang sekali sehari
- 4) Ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan
- 5) Rekreasi paling kurang sekali dalam tiga bulan

- 6) Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah
  - 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi
  - 8) Upaya keluarga mampu menambah pengetahuan agama
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus
- Seluruh indikator pada setiap tahap terpenuhi (pra sejahtera, sejahtera tahap I, II, dan III) dan ditambah dengan indikator :
- a) Memberikan sumbangan secara teratur dalam bentuk material kepada masyarakat
  - b) Aktif sebagai pengurus yayasan/institusi masyarakat.

Demikian pentahapan keluarga sejahtera yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas PLKB dalam Gerakan Keluarga Berencana. Melalui indikator ini para petugas PLKB diharapkan tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dilapangan.

## **B. Gerakan KB Sebagai Bagian Dari Integral Program Pembangunan.**

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pemabngunan masyarakat Indonesia. Pemabngunan masyarakat Indonesia seutuhnya berarti meliputi semua aspek

kehidupan penduduk baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Pembangunan di bidang material dan spiritual merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat.

Pembangunan berarti menciptakan kondisi-kondisi untuk merealisasikan human personality. Menurut Dudley Seers (1972), evaluasi pembangunan difokuskan pada tiga kriteria ekonomi yang saling berhubungan yaitu, reduksi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Ditegaskan juga bahwa target pendapatan nasional dianggap tidak relevan sebagai indikator yang baik tentang pembangunan. Alasannya, kenaikan pendapatan nasional tidak otomatis mengurangi ketimpangan-ketimpangan karena pembangunan dapat disinonimkan dengan konsep perbaikan (improvement).

Sekalipun besarnya penduduk mempengaruhi pembangunan, seringkali kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi distribusi faktor-faktor produksi jauh lebih penting. Hal terakhir inilah yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi seringkali tidak disertai penurunan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Dengan demikian disagregasi pendapatan nasional kedalam kelompok-kelompok penduduk sangat bermakna untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan.

Analisis dibidang kependudukan KB juga perlu memperhatikan penduduk sebagai agregasi individu (manusia) dan manusia sebagai komponen penduduk. Perubahan penduduk selama ini dipahami sebagai hasil dinamika dalam kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk, yang dipengaruhi dinamika bergai aspek dalam masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, topic besar kependudukan sangat concern dengan pertumbuhan yang tinggi. Ada ketakutan yang besar bahwa jumlah penduduk melampaui daya tampung dan daya dukung yang ada. Bila demikian, masalah utamanya adalah pengendalian kelahiran, program pengendalian kelahiran seperti keluarga berencana menjadi pilihan Negara-Negara yang laju pertumbuhan penduduknya tinggi, ternyata masalahnya tidak sesederhana itu, Indonesia sukses dengan program KB, namun ditempat lain tidak.

Peningkatan usaha pembangunan yang ada mulanya dititik beratkan pada aspek material terutama dibidang ekonomi, telah diperluas sedemikian rupa sehingga meliputi pula aspek spiritual dan bidang sosial termasuk aspek kependudukan Keluarga Berencana.

Gerakan kependudukan KB yang merupakan salah satu program pembangunan menjadi bagian integral dari program pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sehingga dengan keberhasilan program ini akan membawa pengaruh positif

terhadap kegiatan pembangunan lainnya begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana harus melibatkan seluruh masyarakat, baik lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya guna menjamin keberhasilan gerakan tersebut.

Keberhasilan program keluarga berencana sejak awal pelaksanaannya hingga saat ini, yang telah menurunkan fertilitas, ternyata memiliki dampak yang cukup luas secara garis besar dampak tersebut meliputi aspek kultur, sosial, dan ekonomi. Salah satu dampak keberhasilan program KB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang menarik untuk dipelajari yaitu aspek ekonomi keluarga, dimana keluarga peserta KB mempunyai peluang untuk meningkatkan status ekonomi keluarganya, karena hanya melahirkan, memelihara, dan mendidik anak yang sedikit. Menurut Effendi dan Sukamdi (1994), turunnya fertilitas secara relatif mengurangi jumlah kelahiran, sehingga jumlah anak sedikit akan menurunkan keseluruhan biaya anak, dengan demikian peluang untuk mencapai keluarga sejahtera semakin besar.

Penurunan fertilitas, selain berpengaruh terhadap struktur penduduk juga berdampak pada struktur keluarga, rata-rata jumlah anak untuk setiap keluarga semakin sedikit hingga rata-rata jumlah jiwa setiap keluarga semakin kecil. Jumlah anggota keluarga yang kecil memungkinkan

pengurangan pengeluaran keluarga dan menambah jumlah tabungan, baik melalui tabungan maupun investasi bagi usaha produktif, serta mendorong terciptanya peluang bagi wanita peserta KB untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di luar rumah, Papanek (1986) dan Ballante et.al.(1990), mengemukakan bahwa banyaknya waktu yang dipergunakan untuk wanita yang bekerja diluar rumah terkait dengan banyaknya anak yang dilahirkan. Semakin sedikit anak, maka semakin banyak waktu yang dipergunakan diluar rumah. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Faturrohman (1996), bahwa rendahnya fertilitas memberi kesempatan kepada wanita untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik serta aktif secara ekonomi.

Dalam rangka melibatkan masyarakat dan pemerintah secara langsung dalam gerakan keluarga berencana diperlukan suatu kesepakatan politis, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah itu sendiri. Penetapan kebijaksanaan oleh MPR yang dituangkan dalam GBHN 1973 dan GBHN 1978 serta dijabarkan kegiatannya oleh pemerintah melalui Pelita II dan Pleita III.

Kesepakatan yang dikemukakan itu merupakan kesepakatan politis pada tingkat Nasional yang selanjutnya dijabarkan sedemikian rupa secara operasional pada berbagai tingkat dan lapangan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan

Desa/Kelurahan). Penjabaran kesepakatan politis ini ditingkat lapangan sangat penting, karena pada akhirnya pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana dilaksanakan dilapangan terutama ditingkat pedesaan dan lebih utama lagi bagi para pasangan suami istri.

Kesepakatan politis ditingkat lapangan sangat ditentukan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa/Lurah), dalam rangka menarik atau menumbuhkan partisipasi instansi-instansi pemerintah di wilayahnya atau masyarakat dilingkungannya.

Keberhasilan Gerakan Keluarga Berencana yang tampak dewasa ini merupakan salah satu realisasi kesepakatan politis tadi, disamping usaha pengelola, pelaksana Gerakan Keluarga Berencana yang terus menerus.

Disamping hal tersebut diatas juga tak kalah pentingnya untuk turut diperhitungkan adalah bagaimana partisipasi masyarakat, dalam pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana disadari sepenuhnya bahwa tidak mudah diterima begitu saja oleh masyarakat. Menyadari hal ini maka pemerintah sejak zaman orde baru telah mengalami langkah dan inisiatif mengikutsertakan masyarakat agar sadar akan perlunya pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana, dengan demikian apa yang telah digagas oleh pemerintah perlu dilanjutkan sehingga pelaksanaan Gerakan KB secepatnya disadari

masyarakat sebagai salah satu hal yang sangat menentukan dalam mewujudkan tujuan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Pengalihan tanggung jawab kepada masyarakat dimulaidari timbulnya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok akseptor dengan berbagai nama yang bervariasi, dengan adanya kelompok akseptor ini, pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana telah mulai ditangani sendiri oleh masyarakat pada tingkat Desa/Kelurahan.

Pengalihan tanggung jawab melalui kelompok-kelompok yang telah dikemukakan itu harus berlanjut, artinya tidak hanya berhenti pada kelompok itu, tetapi diteruskan sampai pada unit terkecil dari kelompok masyarakat yaitu keluarga-keluarga sehingga masyarakat sendiri memenuhi kebutuhannya, disilah peranan petugas lapangan keluarga berencana dituntut kehadirannya sebagai motivator atau pengayom.

Gerakan Keluarga Berencana menunjukkan suatu keadaan yang ditandai dengan semakin meningkatnya peserta aktif dan peningkatan peran masyarakat. Peningkatan pada gilirannya memberikan pengaruh pada penurunan tingkat fertilitas, yang jika dilihat dari segi waktu menunjukkan penurunan yang cukup berarti. Dalam keadaan demikian situasi masyarakat dapat diperidiksi mengindikasikan tanda-tanda perluasan masalah KB, untuk menghadapiperkemangan

tersebut diperlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta program yang menghubungkan KB dengan pembangunan sektor pembangunan lainnya yang semuanya itu menuju perbaikan kualitas hidup manusia.

Dengan diperluasnya Gerakan Keluarga Berencana kedalam aspek-aspek lain kependudukan yang lebih luas maka konsekwensinya dituntut adanya perbaikan-pernaikan pengelolaan program kependudukan yang berfungsi sebagai simulator kebijaksanaan dalam rangka sistim kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu.

Perumusan masalah kependudukan dan KB tersebut dalam formulasinya pertama-tama diperlukan adanya sinkronisasi kebijaksanaan sektoral yang menjadi landasan utama bagi masing-masing sector untuk pelaksanaan selanjutnya.

### **C. Pentingnya Intensitas Penyuluhan Keluarga Berencana Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga**

Setelah keluarga berencana dinyatakan sebagai program nasional tahun 1970, ide keluarga berencana dengan cepat tersebar ketengah masyarakat, Namun pada saat program nasional ini berjalan, baru dirasakan adanya kelemahan-kelemahan dalam mengajak masyarakat agar melaksanakan keluarga berencana. Kelemahan itu antaran lain adalah bahwa usaha-usaha motivasi masyarakat agar menerima

serta melaksanakan KB melalui media massa saja ternyata tidak cukup.

Usaha ini harus diikuti dengan pendekatan KIE guna mencapai tingkat efektifitas yang tinggi dan selanjutnya dilakukan peningkatan penegelolaan. Dalam pengelolaan pelaksanaan KIE inilah seorang petugas lapangan KB dituntut keuletannya dalam mengembangkan strategi penyuluhan sebagai petugaas yang langsung berhadapan dengan masyarakat tingkat Desa/Kelurahan. Secara garis besarnya fungsinya adalah sangat penting, karena ia diharapkan memotivasikan individu dan masyarakat agar mereka menerima dan melaksanakan KB. Ia juga berfungsi mengumpulkan informasi tentang tanggapan masyarakat terhadap KB dan melaporkannya kepada atasan/unit pelaksana.

Kegiatan dari petugas lapangan KB ini, dengan tidak bermaksud mengurangi pentingnya peranan penerapan komunikasi massa dan kelompok merupakan kegiatan yang paling mudah untuk menyentuh dasar kehidupan psikis seseorang karena sifat pendekatan persuasif maka peranan petugas lapangan KB dalam Gerakan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia perlu diperkokoh, sesuai tugas yang diembannya.

Pada awal-awal Gerakan KB NAsional kegiatan para petugas lapangan KB selaku pembawa misi penerangan wawan

muka terbentuk proyek, yang selanjutnya berkembang pola operasionalnya yaitu perluasan jangkauan serta pembinaan, secara implisist tujuan yang akan dicapai adalah memperkenalkan ide-ide keluarga berencana dikalangan masyarakat.

Karena itu petugas lapangan KB meruoakan tenaga pelaksana KB yang memberikan penyuluhan secara perorangan (penjelasan) dari hati kehati kepada anggota masyarakat. Petugas lapangan KB adalah petugas yang bergerak untuk menghubungi, mengajak dan membina anggota masyarakat secara perseoranang agar mereka ikut serta secara nyata berdasarkan pengertian, dan kesadaran, dalam pelaksanaan Gerakan KB dengan jalan menjadi peserta KB (akseptor) dalam jangka waktu yang telah direncanakan. Berhasil tidaknya gerakan KB akan banyak ditentukan oleh sikap dan cara petugas lapangan KB mengadakan pendekatan serta hubungan dengan orang-orang atau keluarga yang menjadi sasaran. Oleh karena itu petugas lapangan KB dalam menjalankan tugasnya membutuhkan kecakapan khusus, baik keterampilan dalam mengadakan pendekatan dan hubungan dengan masyarakat maupun dalam tata kerjanya. Hanya dengan kondisi demikian petugas lapangan KB sebagai petugas penyuluh dalam Gerakan Keluarga Berencana yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga dapat tergugah hatinya untuk

melaksanakan Gerakan Keluarga Berencana tersebut demi tercapainya kesejahteraan dalam keluarga. Konsekwensi ini akan memberi pengaruh positif jika intensifikasi pelaksanaan tugas para petugas lapangan KB dioptimalkan.

Falsafah pembangunan keluarga sejahtera sebagai sasaran program pembangunan telah lama dicetuskan dalam Gerakan KB Nasional di Indonesia yaitu sejak dari keberadaan Perkumpulan Keluarga Berencana Nasional Indonesia(PKBI) tahun 1957 sampai saat ini. Sehingga program keluarga berencana menjadi gerakan keluarga berencana yang operasionalnya tetap bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Anonim 10, 1990). Falsafah tersebut diatas tidak lain adalah memeberikan kesempatan untuk berperan serta dalam upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera (Anonim 11, 1990), dengan mengupayakan pelembagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahteran (NKKBS) yang tentunya tidak hanya mewujudkan keluarga kecil saja melainkan membangun keluarga-keluarga sejahtera dan mandiri, yang diharapkan tidak terpisah, tapi saling terkait, baik programnya maupun hasil secara berkelanjutan, yakni tercapainya jumlah keluarga yang kecil atau sedikit dan mengupayakan kesejahteraan jasmani dan rohani.

Progran KB merupakan fase pertama dalam pelaksanaan kebijakan keluarga berencana di Indonesia yang orientasinya

lebih kepada norma keluarga kecil, yang dilanjutkan dengan fase kedua yaitu Gerakan KB Nasional yang lebih ditekankan untuk menciptakan keluarga sejahtera (Effendi, 1996).

Untuk melihat sejauh mana intensitasnya pelaksanaan penyuluhan KB pada masyarakat oleh petugas lapangan KB maka berturut-turut di bawah ini akan dijelaskan sebagai berikut :

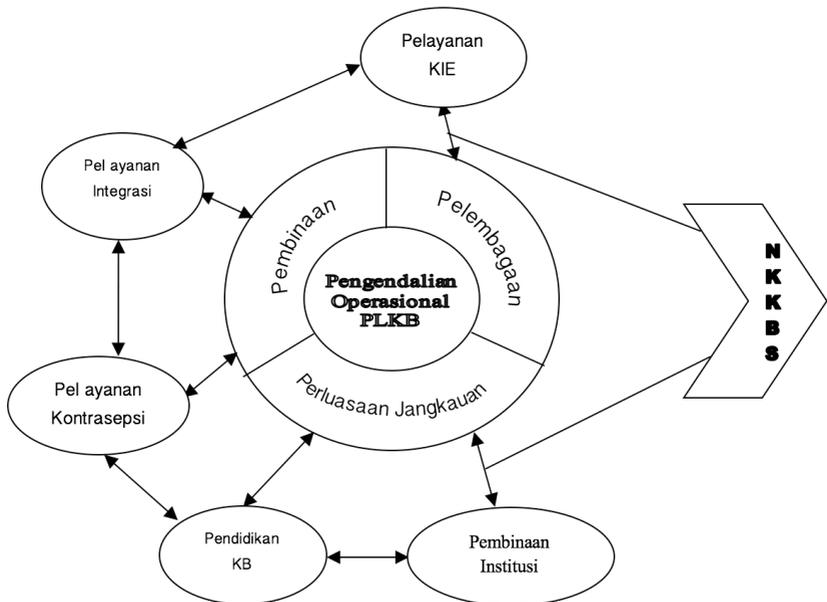
1. Fungsi PLKB (Petugas Lapangan KB)
  - a. Secara umum Petugas Lapangan KB berfungsi sebagai penengendali operasional gerakan KB di tingkat Desa, yang meliputi pengendalian input dan output yang dikecualikan lebih lanjut dari tingkat yang lebih atas Kecamatan dan dari Desa itu sendiri, sehingga ditingkat Desa dapat tercipta satu situasi koordinasi yang baik antara tim KB yang terdiri atas unsure-unsur formal dan informal (tokoh masyarakat). Dengan kata lain petugas lapangan KB harus dapat menumbuhkan, menegmbangkan dan mengarahkan semua potensi yang ada di Desa/Keluarahan, RT, RW untuk menegmbnagkan NKKBS dimasyarakat yang dimaksud adalah :
    - 1) Dengan penengendalian input artinya pengendalian terhadap masukan-masukan untuk pelaksanaan gerakan KB wilayah kerjanya meliputi segi-segi ;

- a) Dana ; baik yang disediakan oleh gerakan KB maupun yang dapat digali potensi daerah serta masyarakat sendiri
  - b) Tenaga ; baik tenaga dari unsur pamong Desa/Kelurahan, petugas pemerintah yang mempunyai lokasi kerja di wilayah tersebut maupun tenaga masyarakat serta kader-kader.
  - c) Sarana ; baik sarana yang disediakan gerakan maupun dari sarana dari potensi daerah atau dari masyarakat. Semua ini harus digali dan diintegrasikan untuk diarahkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan gerakan keluarga berencana.
- 2) Pengendalian Proses artinya pengendalian terhadap proses pelaksanaan kegiatan gerakan KB, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengawasan dan evaluasi.
- 3) Pengendalian OutPut artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan selalu diarahkan kepada tujuan atau dilaksanakan selalu diarahkan kepada tujuan atau hasil-hasil yang ingin dicapai misalnya, pencapaian peserta KB aktif sesuai dengan tahap perkembangan gerakan KB di wilayah yang bersangkutan

b. Secara khusus, Petugas Lapangan KB berfungsi sebagai pelaksana dan pengendali operasional Gerakan KB Nasional meliputi :

- 1) Komunikasi informasi dan edukasi (KIE)
- 2) Pelayanan kontrasepsi
- 3) Pelayanan pendidikan KB
- 4) Intensitas pembinaan masyarakat

untuk jelasnya fungsi petugas lapangan KB digambarkan seperti terlihat dalam bagan berikut ini;



uraian masing-masing fungsi diatas meliputi :

- a) Fungsi petugas lapangan KB pada pelayanan KIE adalah menumbuhkan, mengembangkan dan mengarahkan komunikasi, informasi dan edukasi baik yang dilakukan oleh pimpinan formal maupun informal sesuai dengan kebijaksanaan dan strategi operasional yang telah ditetapkan sehingga tercipta suatu partisipasi masyarakat yang kelak mendukung keberhasilan gerakan KB.
- b) Fungsi petugas lapangan KB pada pelayanan kontrasepsi adalah membantu kelancaran pelayanan teknis bagi masyarakat baik di klinik KB, kelompok KB, Dokter swasta, Posyandu, Bidan swasta, dan pelayanan terpadu lainnya dengan cara menyiapkan calon-calon akseptor serta membantu pencatatan laporan dan lain-lain.
- c) Fungsi petugas lapangan KB pada pelayanan integritas adalah memadukan pelayanan KB dengan pelayanan-pelayanan program pembangunan lainnya seperti imunisasi, pemeriksaan ibu hamil/ menyusui, kesehatan lingkungan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan priputna.

- d) Fungsi petugas lapangan KB pada pelayanan pendidikan KB adalah membantu melancarkan proses pelayanan pendidikan KB di Desa/Kelurahan, RT dan RK
- e) Fungsi petugas lapangan KB pada pembinaan institusi adalah menumbuhkan dan membina institusi yang ada di Desa/Kelurahan atau daerah kerja, agar selanjutnya mampu melakukan berbagai kegiatan khususnya dalam kegiatan gerakan KB. Fungsi petugas lapangan KB ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan tahap pengayoman, sehingga hasil kegiatan yang dilakukan petugas lapangan KB, dapat selalu dijamin dari segi kualitasnya. Masalah pengayoman, harus mendapat perhatian yang khusus dari petugas lapangan KB karena tujuan pencapaian gerakan KB adalah mutu/kualitas hasil kegiatan petugas lapangan KB harus dilakukan secara berencana dan berlanjut

## 2. Tugas PLKB (Petugas Lapangan KB)

Didalam melaksanakan tugasnya di Desa/Kelurahan, petugas lapangan KB adalah sebagai mitra Kepala Desa/Kelurahan dalam pengayoman kesejahteraan keluarga dalam bidang KIE dan pelayanan kontrasepsi, artinya petugas

lapangan KB adalah sebagai wakil Pengawas Petugas Lapangan KB yang berada di Desa/Kelurahan, untuk meneruskan kebijaksanaan dan dukungan Gerakan KB dari tingkat atas/Kecamatan ke tingkat Desa/Kelurahan, RT dan RW. Untuk itu uraian tugas-tugas petugas lapangan KB dapat dilihat sebagai berikut;

Untuk itu maka tugas-tugas Petugas Lapangan KB (PLKB) meliputi;

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan
- 3) Pembinaan
- 4) Pencatatan laporan dan
- 5) Evaluasi

Uraian masing-masing dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Tugas PLKB dalam perencanaan

Untuk seorang petugas lapangan KB rencana kerja merupakan suatu kegiatan utama yang sangat penting, karena akan menjadi pedoman dan mendasari setiap gerak dilapangan. Disamping itu rencana kerja petugas lapangan KB sangat perlu untuk atasan petugas lapangan KB, khusus pengawas PLKB, dengan adanya rencana kerja ini, pengawas PLKB akan selalu mengetahui apa yang dikerjakan petugas lapangan KB, dimana lokasi kerja, dan kapan petugas lapangan KB melakukan kegiatannya.

Dengan demikian rencana kerja PLKB ini merupakan alat pengendalian bagi para pengawas PLKB.

Dalam penyusunan rencana kerja PLKB harus memahami hal-hal sebagai berikut ;

- 1) Data perkembangan program KB diwilayah kerja (Desa/Kelurahan) sampai dengan bulan yang bersangkutan.
- 2) Target kerja yang dicapai per Desa/Kelurahan pertahun yang dijabarkan menjadi target kerja bulanan.
- 3) Atas dasar pencapaian target bulanan yang lalu, PLKB menghitung kembali berapa target akseptor (baik baru maupun akseptor aktif) yang harus dicapai pada bulan yang akan datang.
- 4) Setelah menghitung target yang akan dicapai, PLKB harus membagi target tersebut menurut pembagian RT, RW, dan dusun/lingkungan sehingga target terbagi habis.
- 5) Sebelum rencana kerja inidipastikan, PLKB harus berkonsultasi dengan pengawas PLKB pada waktu stafmeeting, maksudnya harus ada penyesuaian anatara rencana kerja pengawas PLKB dengan rencana kerja PLKB.

- 6) Pengawas PLKB mengkonsultasikan rencan kerja kecamatan kepada Camat untiukkemudian dibawah kedalamforum rapat konsulasi kecamatan.
- 7) Setelah rakor kecamatan, pengawas PLKB membuat jadwal yang pasti untuk kegiatan bulanan berikutnya, demikian pula PLKB membuat jadwl yang pasti untuk menggarap Desa/Kelurahan wilayah kerjanya, jadi PLKB membuat rencana kerja bulanan untuk masing-masing Desa/Kelurahan untuk wilayah kerjanya.
- 8) Rencana kerja bulanan ini, dikonsultasikan oleh PLKB kepada Kepala Desa/Lurah untuk disepakati, kemudian dikonsultasikan kepada PPKBD, sun PPKBD serta unsur Desa/ Kelurahan lainnya yang dilibatkan dalam kegiatan penggarapan Desa/Kelurahan, pemebrian informasi ini dapat dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan dalam suatu forum rapat (Rapat Koordinasi Desa)
- 9) Atas dasar rencana kerja bulanan untuk penggarapan Desa/Kelurahan ini, maka PLKB membuat rencana kerja mingguan.

## 2) Tugas PLKB dalam pelaksanaan

Dalam pelaksanaan gerakan KB diwilayah kerja, petugas lapangan KB bertugas untuk melaksanakan seluruh

rencana kerja bulanan. Pelaksanaan rencana kerja bulanan dilakukan oleh petugas lapangan KB bersama dengan unsure-unsur pelaksana yang ada di Desa/Kelurahan menurut peran masing-masing.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan gerakan KB harus selalu berkonsultasi dengan Kepala Desa/Kelurahan dan pengawas PLKB serta melakukan koordinasi dan integrasi yang luwes dengan para pelaksana, hal lain yang harus diperhatikan pula adalah mobilisasi total seluruh potensi baik potensi pemerintah maupun masyarakat sendiri sehingga kegiatan yang dilakukan merupakan pelayanan bersama masyarakat, artinya dalam setiap kegiatan masyarakat selalu diikuti sertakan dan selalu memanfaatkan momentum-momentum yang ada.

Disamping melaksanakan rencana kerja yang telah disusun, petugas lapangan KB juga harus melakukan kegiatan-kegiatan diluar rencana kecamatan seperti kegiatan safari KB, senyum terpadu dan lain-lain. Tetapi sejauh ini mungkin hal ini harus disinkronisasikan dengan rencana kerja yang telah disusun tersebut, beberapa hal petugas lapangan KB perlu perhatikan pada waktu melaksanakan kegiatan ;

- a) Pelaksanaan kegiatan gerakan KB di Desa/Lurah
  - 1) Kegiatan pendataan dan pemetaan PUS dan peserta KB
  - 2) Kegiatan musyawarah masyarakat desa/lurah yang sudah memungkinkan untuk melaksanakannya
  - 3) Kegiatan KIE yang mencakup kegiatan penerangan dan motivasi untuk mencari peserta KB baru atau untuk memantapkan peserta KB yang sudah ada. Kegiatan KIE untuk menumbuhkan dan membina kelompok KB, kegiatan KIE untuk mendapat kesempatan dan dukungan dari tokoh masyarakat dan lainnya
- b) Kegiatan pelayanan yang mencakup
  - 1) Kegiatan apa yang akan dilaksanakan
  - 2) Siapa yang perlu dilibatkan dalam kegiatan tersebut
  - 3) Dan bagaimana/apa peranannya baik dari unsur instansi, tokoh masyarakat maupun masyarakat itu sendiri
  - 4) Bagaimana menyiapkan dana dan sarana
  - 5) Dapat dipadukan dengan kegiatan dari instansi lain

### 3) Tugas PLKB dalam Pembinaan

Kegiatan pembinaan merupakan kegiatan yang paling penting dalam rangkaian tugas petugas lapangan KB. Ada beberapa jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh PLKB antara lain :

- a) Pembinaan terhadap peserta KB, tujuannya adalah untuk melestarikan keikutsertaan dalam berKB dan untuk menjadikan peserta KB sebagai pelaksana bahkan sebagai pengelola KB diwilayahnya. Dalam kaitan ini, jika diwilayah tugas PLKB peserta KBnya sudah cukup banyak (berkisar antar 0-15%) maka PLKB harus mulai merangsang masyarakat agar mau membentuk PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan mereka harus dibina agar berfungsi sebagai tim Pembina KB desa/kelurahan yang antara lain adalah :

- 1) Menyalurkan alat kontrasepsi ulang

- 2) Melakukan penerangan dan motivasi

Selanjutnya apabila peserta KBnya berkisar antara 15-35% maka disamping membina PPKBD, PLKB harus sudah mulai merangsang masyarakat untuk mengembangkan PPKBD pada

tingkat dusun, yaitu yang disebut sub PPKBD, fusi hampir sama dengan PPKBD tetapi sub PPKBD bergerak ditingkat dusun sebagai perpanjangan tangan dari PPKBD dalam kegiatan :

- a) Menyalurkan alat kontrasepsi ulang
- b) Melakukan penerangan dan motivasi, baik terhadap calon peserta maupun peserta KB.

Apabila dalam suatu dusun, peserta KB nya sudah semakin banyak pada tingkat dibawah dusun, petugas lapangan KB sudah mulai merangsang tumbuhnya kelompok-kelompok KB, sehingga Desa/Lurah yang peserta KB nya di atas 35%, kelompok-kelompok KB/akseptor ini sudah aktif dan berfungsi.

Inilah hakekatnya dari pembinaan peserta KB yang dilakukan petugas lapangan KB untuk menjadikan peserta KB menjadi pelopor, penggerak dan pengelola KB diwilayahnya.

- b) Pembinaan terhadap institusi masyarakat baik yang khusus bergerak dibidang KB seperti PPKBD, sub PPKBD dan kelompok akseptor maupun yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatanKB seperti PKK, LKMD dan lain-lain.

Tujuannya adalah agar institusi masyarakat ini menjadi wadah kegiatan KB serta kegiatan-kegiatan integrasi lainnya dan bahkan diharapkan institusi masyarakat ini menjadi wadah upaya-upaya untuk pelembagaan dan pemberdayaan dan pembudayaan NKKBS.

- c) Pembinaan terhadap kegiatan pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh petugas lapangan KB (PLKB) dan PPKBD, serta kelompok KB baik dalam kegiatan integrasi
- d) Pembinaan kesepakatan-kesepakatan yang sudah terbentuk baik terhadap kepala Desa/Lurah dan aparatnya maupun terhadap unsure-unsur pelaksana KB lainnya di tingkat Desa/Kelurahan. Seperti biasanya kegiatan pembinaan ini dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung artinya bias petugas lapangan KB secara langsung membina institusi binaan ini dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah sendiri, atas dasar dorongan dari PLKB. Kegiatan-kegiatan ini tidak berarti harus selalu berupa kegiatan khusus tetapi sebaliknya dilaksanakan bersama kegiatan lainnya misalnya pada saat kegiatan pelayanan terpadu dan lain-lain.

- 4) Tugas PLKB dalam pencatatan dan pelaporan  
Kegiatan pencatatan dan pelaporan ini meliputi ;
  - a) Pencatatan dan pelaporan kegiatan PLKB sendiri
  - b) Pencatatan dan pelaporan kegiatan PPKBD, sub PPKBD serta kelompok KB baik untuk kegiatan KB maupun untuk kegiatan integrasikan lainnyaSemua kegiatan pencatatan ini akan dilaporkan oleh PLKB kepada atasannya dalam satu bentuk pelaporan terpadu.
- 5) Tugas PLKB dalam evaluasi  
Kegiatan evaluasi yang dilakukan PLKB ini meliputi ;
  - a) Evaluasi terhadap masukan  
Dalam hal ini PLKB menilai tentang ;
    - c) Dana  
Berapa banyak dana yang disediakan untuk kegiatan yang dilakukan pada bulan yang bersangkutan baik dari sumber BKKBN, instansi lain atau swadaya masyarakat, yang dipergunakan untuk pelaksanaan gerakan KB. Dengan demikian PLKB sudah dapat member kesimpulan apakah dan untuk kegiatan PLKB dalam hal ini gerakan KB di Desa/Kelurahan hanya dari sumber BKKBN

atau sudah ada dana-dana lain yang mendukung baik dari instansi lain maupun darimasyarakat sendiri.

d) Tenaga

Berapa banyak PPKBD, sub PPKBD serta kelompok KB, apakah jumlahnya memadai atau belum, mengenai tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana Bantuan/ dukungannya terhadap gerakan KB, jelas sangat dituntut peran sertanya.

e) Sarana dan metode

Sarana apa saja yang tersedia untuk melakukan kegiatan KB di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Metode yang digunakan; bagaimana cara KIE dilakukan apakah melalui wawancara, penerangan kelompok dan lain-lain, bagaimana kegiatan pelayanan kontrasepsi, pelayanan integrasi, pendidikan KB serta pembinaan institusi masyarakat dilakukan.

b) Evaluasi terhadap proses

Dalam hal ini PLKB menilai mengenai bagaimana proses penggarapan gerakan KB yang dilakukannya sejak tahap perencanaan,

pelaksanaan, pembinaan, pencatatan, dan pelaporan serta penilaian/evaluasi.

c) Evaluasi terhadap keluaran

Dalam hal ini PLKB melakukan penilaian terhadap pencapaian akseptor baru dan akseptor atif, berapa target yang ditentukan dan berapa hasil yang didapat, dusun mana yang sisa PUS nya masih tinggi dan Desa/Kelurahan yang pencapaian peserta KB nya sudah cukup tinggi. Peningkatan jumlah sub PPKBD dan kelompok KB sudah tentu wadah-wadah untuk pembinaannya pun harus meningkat pula. Dengan demikian peningkatan jumlah Sub PPKBD dan kelompok KB perlu di evaluasi.

d) Evaluasi terhadap faktor yang mendukung dan atau hambatan yang dihadapi

Hasil evaluasi PLKB ini, dikonsultasikan kepada PLKB pada waktu StafMeeting untuk mendapatkan arahan atau saran-saran lainnya, sebelum oleh PLKB menyampaikan evaluasi ini disampaikan terlebih dahulu kepada Kepala Desa/Lurah atau disajikan dalam koordinasi Desa/Kelurahan

3. Tempat Tugas dan Waktu Kerja PLKB (Petugas Lapangan KB)

Berdasarkan kelima fungsinya, petugas lapangan KB (PLKB) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1) Di kantor (1 hari/minggu)

Yang dimaksud kantor PLKB adalah kantor Desa/Kelurahan, dan dalam keadaan tidak memungkinkan (jaraknya jauh), maka petugas lapangan KB tidak usah tiap hari ke Kantor Desa/Kelurahan dahulu. Sebelum menjalankan tugasnya sehari-hari PLKB wajib mengunjungi kantor dahulu dengan tugas antara lain;

- a) Mengisi daftar hadir
- b) Mempelajari input proses dan output program
- c) Menyelenggarakan pemetaan dinamis
- d) Merumuskan rencana berkala
- e) Menyelenggarakan pencatatan dan pelaporan

2) Diklinik (1 hari/minggu)

Sekali dalam seminggu bergantian PLKB wajib berada di klinik dengan tugas antara lain ;

- a) Mempelajari data akseptor, intitusi dan membandingkan dengan data Desa/Kelurahan.
  - b) Menyampaikan tuntutan program Desa/Kelurahan garapannya
  - c) Membantu kelancaran pelayanan kontrasepsi di klinik Keluarga Berencana
  - d) Membantu melakukan penerangan dan motivasi kepada pengunjung klinik KB/Puskesmas.
- 3) Dilapangan (4 hari/seminggu)
- Sesuai dengan namanya yaitu petugas lapangan maka ia wajib memanfaatkan sebagian besar waktunya dilapangan dengan tugas antara lain sebagai berikut ;
- a) Menghubungi pehjabat setempat/pendekatan tokoh formal
  - b) Orientasi daerah kerja, untuk pendataan dan pemetaan
  - c) Identifikasi dan pendekatan tokoh masyarakat formal dan informal
  - d) Menyelenggarakan pertemuan tokoh formal dan informal

- e) Penyelenggaraan KIE, khususnya bagi tokoh dan kelompok lain
- f) Mengajak dan mengorganisir tokoh masyarakat dalam kegiatan program
- g) Membina dan mengembangkan PPKBD/Pos KB Desa/Kelurahan, kelompokKB dan sub PPKBD
- h) Mengawasi kelancaran tim KB Kecamatan
- i) Membina hubungan dengan berbagai pihak yang erat kaitannya dengan gerakan KB tingkat Desa/Kelurahan.

Dari uraian tentang fungsi, tugas dan tempat kerja PLKB diatas maka inti fungsi dan tugasnya adalah sebagai motivator Gerakan KB Nasional dalam arti sebagai berikut ;

- 1) Memotivasi sasaran agar menjadi peserta KB
- 2) Memotivasi sasaran agar lebih lanjut menjadi motivator KB
- 3) Memotivasi dalam rangka pembentukan kesepakatan
- 4) Memotivator dalam rangka pengendalian

Dengan demikian PLKB mempunyai peranan penting karena ia langsung berhadapan dengan masyarakat, PLKB merupakan petugas yang paling depan rentetan petugas-petugas KB. Berhasil atau tidaknya Gerakan KB akan banyak

ditentukan oleh sikap dan cara PLKB mengadakan pendekatan serta hubungan dengan orang-orang atau yang menjadi kliennya. Oleh karena itu PLKB dalam melaksanakan tugas menuntut kacakapan dan keterampilan dalam melakukan pendekatan dan hubungan dengan masyarakat maupun dalam tata kerja seperti,

- 1) Bagaimana mengajak peserta KB, Program PLKB sebagai salah satu komponen pelaksana KIE mengarahkan sasarannya kedalam tiga dimensi proram yaitu ; perluasan jangkauan, pembinaan, dan pengembangan pembudayaan gagasan KB. Hal ini sejalan dengan salah satu dari tujuan Gerakan KB Nasional yaitu bahwa mengembangkan usaha peningkatan mutu sumber daya manusia untuk memperbaiki taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan keluarga dari masyarakat dalam mempercepat pelembagaan nilai-nilai keluarga kecil. Selain itu diharapkan pula menumbuhkan lingkungan sosial udaya serta memperluas kehadiran para pengikut NKKBS di masyarakat.
- 2) Bagaimana membina peserta KB, sebagaimana telah diutarakan diatas, sehubungan denga tipe kegiatan dasar PLKB yang ada pada umumnya berbentuk kombinasi antara kontak langsung dan

kontak tak langsung. Pendekatan PLKB dalam kontak langsung telah membentuk motivator baru, baik dari kelompok akseptor lastari maupun kelompok lainnya

Disamping itu pula PLKB telah menggarap institusi masyarakat, baik formal maupun informal. Oleh karena itu kontak ini melalui institusi-institusi masyarakat, kegiatan kunjungan keluarga Pasangan Usia Subur (PUS), semakin kecil karena mereka telah digarap oleh kelompok masyarakat yang pro KB.

- 3) Pelembagaan KB, untuk lebih mempercepat usaha-usaha pelembagaan Gerakan KB Nasional kepada masyarakat dan untuk terwujudnya NKKBS, fungsi dan status PLKB ditingkatkan pula sebagai petugas pembangunan yang serba guna, untuk tujuan itu BKKBN telah melaksanakan pendekatan-pendekatan timbale balik kepada instansi-instansi lainnya yang banyak kaitannya dengan program pembangunan Desa/Kelurahan yang mendukung terciptanya NKKBS antara lain seperti Direktoral Jenderal Koperasi, Departemen Kesehatan, dan lain-lain

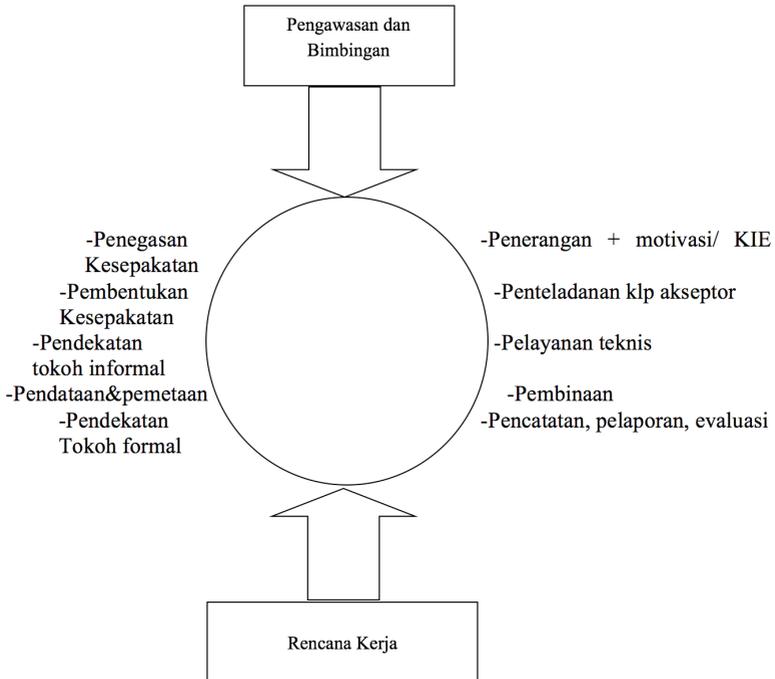
Dengan demikian para PLKBakan merupakan salah satu petugas yang membina, menyadarkan masyarakat tentang

kelestarian sumber alam baik yang berhubungan dengan perluasan jangkauan, pembinaan maupun kelembagaan KB dalam rangka pencapaian keluarga sejahtera.

Karena itu pada dasarnya PLKB dalam melaksanakan fungsi dan tugas serta kewajibannya tidak semata-mata dititik beratkan pada hasil, tetapi juga dituntut bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Adapun langkah kerja dari PLKB itu adalah sebagai berikut, dalam system penggarapan Gerakan KB Nasional tugas-tugas yang dilakukan oleh PLKB di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan ke bawah mencakup 10 (sepuluh) langkah yang harus dilaksanakan yaitu:

- 1) Pendekatan tokoh formal
- 2) Pendataan dan pemetaan
- 3) Pendekatan tokoh informal
- 4) Pembentukan kesepakatan
- 5) Penegasan kesepakatan
- 6) Penerenagan dan motivasi
- 7) Penteladanan/pembentukan kelompok pelopor
- 8) Pelayanan teknis
- 9) Pembinaan
- 10) Pencatatan, pelaporan dan evaluasi

Untuk lebih jelasnya sepuluh langkah pengelolaan Gerakan KB Nasional yang harus dilakukan PLKB dapat digambarkan sesuai bagan berikut;



Sumber : BKKBN

Kegunaan sepuluh langkah penggarapan tersebut merupakan urutan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PLKB dalam menangani Gerakan KB Nasional, baik dalam rangka kegiatan untuk menghasilkan peserta KB, maupun pelayanan integrasi, pembinaan institusi masyarakatan maupun untuk kebutuhan pendidikan KB. Dalam pelaksanaan kesepuluh

langkah tersebut, harus diperhatikan pula situasi dan kondisi daerah/wilayah kerja PLKB yang bersangkutan, artinya dalam setiap urutan dari kesepuluhlangkah tersebut dilaksanakan secara utuh dan berurutan.

Apabila beberapa langkah telah cukup memadai dengan kegiatan sebelumnya, kegiatan langsung dapat dimulai dari langkah yang diperlukan. Kemudian mengenai frekuensi kegiatan pada setiap langkah ada yang perlu di ulang-ulang dan ada yang cukup satu kali saja dilakukan dalam waktu tertentu, misalnya apabila penggarapan itu sudah berlangsung secara rutin mungkin pendekatan tokoh formal, pendekatan dan pemetaan serta pendekatan tokoh informal cukup satu kali, namun kegiatan penerangan dan motivasi pelayanan teknis perlu dilakukan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Untuk jelasnya pelaksanaan langkah tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1) Pendekatan tokoh formal

Yang dimaksud pengertian dan tujuan pendekatan tokoh formal adalah ;

- a) Pengertian, suatu kegiatan untuk menciptakan hubungan kerja antara PLKB dengan tokoh-tokoh formal yang ada ditingkat Desa/Kelurahan, sehingga mereka berperan secara aktif dalam mekanisme

penggarapan Gerakan KB Nasional baik pada tahap persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

- b) Maksud dan tujuan, untuk mendapatkan dukungan baik politis maupun pelaksanaan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing dengan penuh rasa tanggungjawab berdasarkan rencana yang telah disepakati.
- c) Hasil yang diharapkan adalah tumbuhnya keakrabatan antara PLKB agar rencana kerja bersangkutan, dipahami baik menyangkut rencana kerja yang disusun, maupun kesediaan dari tokoh formal untuk berperan sesuai dengan yang diharapkan, baik berupa petunjuk, tenaga sarana dan biaya serta pengesahan rencana yang telah disusun (khususnya untuk tokoh tertentu).

## 2) Pendataan dan penataan PUS

Yang dimaksud pengertian dan tujuan pendataan dan penataan PUS adalah

- a) Pengertian, suatu kegiatan pengumpulan (*Collecting*), pencatatan, pengelohan, penganalisaan dan penyajian data.
- b) Maksud dan tujuan, untuk mengenali secara jelas dan rinci situasi dan kondisi wilayah kerja sebagai bahan untuk penyusunan rencana kerja program,

penggarapan Gerakan KB Nasional di daerahnya, penilaian gerakan, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Gerakan KB

- c) Hasil yang diharapkan adalah tersedianya peta, tabel, mengenai keadaan data, data dan peta dibuat secara prodik artinya setiap bulan selalu diperbaiki sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

### 3) Pendekatan tokoh informal

Yang dimaksud pengertian dan tujuan pendekatan tokoh informal adalah :

- a) Pengertian, suatu kegiatan untuk mencapai hubungan kerja anatar PLKB dengan tokoh-tokoh informal yang ada di tingkat Desa/Kelurahan, sehingga mereka berperan secara aktif dalam mekanisme penggarapan Gerakan KB Nasioanl baik pada tahap persiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi.
- b) Maksud dan tujuan, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta tumbuhnya motivasi yang uat dari tokoh masyarakat tentang Gerakan KB Nasional agar pada gilirannya nanti dapat memberikan dukungan yang diperlukan
- c) Hasil yang diharapkan adalah

- Tumbuhnya keakraban antara PLKB dengan tokoh-tokoh informal yang bersangkutan,
- Dipahami maksud, tujuan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan,
- Dipahami Gerakan KB Nasional sehingga tidak menentang dan kemudian mendukungnya,
- Bersedia menghadapi dan menghadiri musyawarah Desa/Keluarahan dan menjadi motivator,
- Dan diperolehnya dukungan baik berupa petunjuk, tenaga maupun sarana dan ia dalam keadaan yang memungkinkan.

#### 4) Pembentukan kesepakatan

Yang dimaksud pengertian dan tujuan pembentukan kesepakatan adalah :

- a) Pengertian, suatu proses yang dilakukan secara sistimatis untuk mencapai kesepakatan politis dan teknis penggerapan gerakan KB yang mencakup kelompok yang lebih luas.
- b) Maksud dan tujuan adalah sebagai berikut
  - Untuk mendapatkan kesamaan pengertian bahasa dan tindakan sesuai dengan fungsi dan peranan masing-masing.

- Untuk menilai hasil bulan lalu dan permasalahan serta merencanakan kegiatan bulan berikutnya.
- c) Hasil yang diharapkan adalah
- Diperolehnya kesamaan pemahaman akan permasalahan yang dihadapi atau penilaian pencapaian bulan yang lalu.
  - Diperolehnya kesepakatan bersama karena permasalahan yang dihadapi atau penilaian pencapaian bulan yang lalu,serta rencana kerja yang akan datang.
- 5) Penegasan Kesepakatan
- Yang dimaksud pengertian dan tujuan penegasan kesepakatan adalah :
- a) Pengertian, suatu proses untuk memantapkan tokoh masyarakat formal dan informal agar berperan aktif sesuai hasil kesepakatan dan rencana kerja yang telah diputuskan dalam rakor desa.
  - b) Maksud dan tujuan adalah agar tokoh masyarakat formal dan informal serta semua potensi yang ada ditingkat desa/kelurahan dapat mewujudkan kesepakatan dalam bentuk tindakan nyata sesuai

dengan mekanisme penggarapan program ditingkat desa/kelurahan, dusun, RW dan RT.

6) Penerangan dan Motivasi

Yang dimaksud pengertian dan tujuan penerangan dan motivasi adalah :

a) Pengertian, suatu penyampaian isi pesan KB kepada sasaran dalam rangka menanamkan pengertian dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan agar mengerti dan melaksanakan gerakan KB nasional, sesuai dengan fase-fase perkembangan program.

b) Maksud dan tujuan adalah :

- Meningkatkan pengetahuan sasaran tentang gerakan KB nasional dan program integrasi yang mendukungnya
- Agar sasaran mau secara sadar menjadi peseta KB
- Mampu mengajak tetangga, kerabatnya untuk menjadi peserta KB
- Agar sasaran bersedia untuk aktif dalam kegiatan KB nasional
- Bersedia menjadi ketua PPKBD, sub PPKBD atau kelompok KB bila diperlukan.

7) Penteladanan (Pembentukan Kelompok Pelopor)

Yang dimaksud pengertian dan tujuan penteladanan adalah:

- a) Pengertian, suatu kegiatan menseleksi dan motivasi calon akseptor aktif baik karena latar belakang pribadi, status dan jabatan maupun karena kemantapannya menjadi peserta KB aktif, pengelola program agar menjadi contoh dan teladan serta dapat mendorong pihak lain yang ada dilingkungannya ikut berperan aktif dalam gerakan KB nasional.
- b) Maksud dan tujuan adalah :
  - Memberi contoh dan teladan bagi calon-calon peserta KB yang akan dilayani selanjutnya
  - Atas dasar keteladanannya dapat meningkatkan jumlah peserta KB aktif dan pemakai alat kontrasepsi yang efektif
  - Meningkatkan jumlah dan mutu pengelola gerakan KB
  - Meningkatkan frekuensi dan mutu kegiatan pengelola gerakan KB didesa/kelurahan, RW, dan RT

#### 8) Pelayanan Teknis

Yang dimaksud pengertian dan tujuan pelayanan teknis adalah :

- a) Pengertian, suatu kegiatan pelayanan teknis kepada sasaran sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan, misalnya pelayanan kontrasepsi kepada calon akseptor dengan memprioritaskan pemakaian IUD atau imunisasi/penimbangan dalam posyandu.
- b) Maksud dan tujuan adalah :
- Meningkatkan mutu pelayanan dengan secara murah, mudah, cepat dan aman
  - Meningkatkan jumlah peserta KB aktif dengan menggunakan alat kontrasepsi efektif
  - Memberikan media yang cepat dan aman kepada akseptor
  - Meningkatkan jumlah ibu hamil, ibu menyusui yang diperiksa serta balita yang ditimbang dan diimunisasi.

9) Pembinaan

Yang dimaksud pengertian dan tujuan pembinaan adalah :

- a) Pengertian, suatu kegiatan membimbing, mengarahkan dan mengaktifkan peserta KB, pelaksana, pengelola gerakan, PPKBD, sub PPKBD, kelompok KB, kader pembangun secara berdaya guna sehingga berperan dalam gerakan KB nasional.

b) Maksud dan tujuan adalah :

- Menetapkan keikutsertaan KB aktif dalam gerakan KB nasional dan menetapkannya menjadi motivator
- Meningkatkan jumlah dan mutu pengelola gerakan, kemudian menetapkan dan memanfaatkannya ditingkat desa/kelurahan, RW, dan RT
- Memanfaatkan dan mengaktifkan PPKBD, sub PPKBD, kelompok KB, kader pembangun, dan kelompok pembinaan peserta KB
- Memantapkan perlunya pemeriksaan terhadap ibu balita, ibu menyusui, dan ibu hamil.

10) Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi

Yang dimaksud pengertian dan tujuan pencatatan, pelaporan dan evaluasi adalah :

a) Pengertian

- Pencatatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat semua proses kegiatan yang dilakukan.
- Pelaporan adalah suatu kegiatan melaporkan kegiatan dan hasil-hasil dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- Evaluasi adalah suatu kegiatan penilaian dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan, berikut

hasil-hasilnya sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan selanjutnya.

- b) Maksud dan tujuan adalah :
- Agar dapat diketahui sejauh mana hasil yang dicapai berdasarkan rencana yang telah ditentukan
  - Menyampaikan informasi kepada pihak yang lebih tinggi untuk menentukan kebijakan/petunjuk lebih lanjut dalam penyusunan rencana kegiatan selanjutnya.

Dari gambaran urutan kerja PLKB dalam melaksanakan penyuluhan dalam rangka mendorong Gerakan KB Nasional menunjukkan adanya langkah yang sistematis dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, pasal 23 ayat (1) untuk membudayakan NKKBS, pemerintah melakukan upaya peningkatan

- 1) Penyuluhan, pembinaan, dan atau pelayanan pengaturan kelahiran
- 2) Penyediaan sarana dan persyaratan yang diperlukan bagi pelayanan pengaturan kelahiran

- 3) Bimbingan terhadap penentuan usia perkawinan dan usia melahirkan yang ideal.

Sebagaimana pula yang dikemukakan pada pasal 16 ayat (1), bahwa untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera, pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan keluarga berencana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petugas lapangan KB (PLKB) merupakan tenaga pelaksana KB yang memberikan penerangan secara perseorangan (penjelasan) dari hati kehati kepada anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain PLKB adalah petugas yang bergerak untuk menghubungi, mengajak, dan membina anggota-anggota masyarakat secara nyata agar timbul pengertian, kesadaran, dalam pelaksanaan Gerakan KB dengan cara menjadi peserta KB dalam jangka waktu yang telah direncanakan. Disamping itu juga turut memberikan penjelasan kepada anggota masyarakat lainnya yang belum mengerti mengenai KB. Dengan demikian peranan PLKB menjadi sangat penting karena ia langsung berhdapan dengan masyarakat, sebagai petugas yang paling depan, sehingga berhasil tidaknya program KB akan banyak ditentukan oleh sikap dan cara PLKB melakukan pendekatan serta hubungan dengan orang-orang atau keluarga yang menjadi sasaran.

Dengan melihat tugas dan peranan PLKB tampak jelas bahwa pelaksanaan penyuluhan secara intensif pada masyarakat sangat penting, karena pelaksanaan Gerakan KB tersebut merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera, yang merupakan

Merupakan tujuan pemerintah dalam pelaksanaan KB. Oleh karena itu tujuan penyelenggaraan Gerakan KB tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah dan atau masyarakat secara terpadu bersama dengan upaya-upaya lain dengan memperhatikan daya dukung alam, daya tampung binaan, dan daya tampung lingkungan sosial. Pada dasarnya pembangunan keluarga sejahtera bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan merupakan tumpuan harapan masa depan dan kebahagiaan bathin.



# **BAGIAN KETIGA**

## **INTENSITAS PELAKSANAAN PENYULUHAN KB**

### **A. Intensitas Penyuluhan**

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap hal-hal yang kaji dalam buku ini, maka ada beberapa konsep yang perlu didefinisikan sebagai berikut :

Intensitas pelaksanaan penyuluhan Keluarga Berencana dimaksudkan adalah frekuensi atau banyak kalinya dan lama waktu (durasi) kegiatan memberi informasi, penerangan atau nasehat yang diperlukan dalam bidang Keluarga Berencana.

Intensitas penyuluhan merupakan frekuensi calon peserta dan peserta KB mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Intensitas penyuluhan sangat berperan dalam peningkatan pengetahuan calon peserta dan peserta KB, oleh karena itu peran peserta dan peserta KB secara partisipatif dan penyuluh haruslah bersenergi dengan baik sehingga

dampak dari penyuluhan itu sendiri dapat terlihat secara maksud intensitas penyuluhan sangat penting dalam proses adaptasi informasi dan teknologi, semakin tinggi mengikuti frekuensi penyuluhan, maka keberhasilan penyuluhan KB dalam mengikuti penyuluhan yang meningkat disebabkan karena penyampaian yang menarik dan tidak membosankan serta yang disampaikan benar-benar bermanfaat bagi peserta KB dan calon pesert KB.

1. Frekuensi penyuluhan, adalah kekerapan melaksanakan penyuluhan.
2. Lama penyuluhan, adalah panjang waktu yang dipergunakan member penjelasan yang dilaksanakan oleh Petugas Lapangan KB kepada masyarakat.
3. Materi penyuluhan, adalah isi-isi pesan kesejahteraan keluarga, jenis alat kontrasepsi dan Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang dikemas selama penyuluhan.
4. Metode penyuluhan, adalah cara yang digunakan oleh Petugas Lapangan KB untuk menyampaikan penyuluhan, meliputi kegiatan hubungan antar pribadi (bentuk kunjungan rumah), pendekatan kelompok dan penyuluhan massa.

5. Sasaran penyuluhan, adalah keluarga yang masih tergolong PUS (pasangan usia subur) dan telah berKB

## **B. Pendukung Pelaksanaan Keluarga Berencana**

Dalam pelaksanaan penyuluhan KB, maka dipandang perlu diperhatikan faktor-faktor pendukung yang terkait dalam proses penyuluhan KB antara lain :

1. Pengertian kesehatan keluarga, adalah pengetahuan tentang keadaan fisik, jasmani, dan sosial dari individu-individu yang terdapat dalam suatu keluarga. Antara individu yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dalam lingkungan siklus keluarga untuk mencapai derajat kesehatan keluarga yang optimal.
2. Pendapatan adalah merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung (Suroto; 2000).
3. Jumlah tanggungan adalah banyaknya anggota keluarga yang terdiri dari istri, dan anak serta orang lain yang turut serta dalam keluarga berada atau hidup dalam satu rumah dan makan bersama yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

4. Pengeluaran adalah pengeluaran konsumsi meliputi semua pengeluaran rumah-rumah tangga keluarga dan perseorangan serta lembaga-lembaga swasta bukan perusahaan untuk membeli barang dan jasa-jasa yang langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

#### Model penyuluhan Keluarga Berencana

Penyuluhan KB merupakan proses kegiatan penyuluhan dengan berbagai model dan metode yang berlangsung terus menerus sambung menyambung dan dilakukan oleh semua pihak yang kompeten dan terjadi dimana saja, itulah sebabnya dalam proses penyuluhan KB tidak mungkin hanya menggunakan satu atau dua metode, saja tidak mungkin, harus dilakukan komprehensif dan terus menerus, contoh saat seseorang ke pasar ada spanduk penyuluhan KB, di kantor kelurahan ada, di pinggir jalan ada, di rumah sakit, puskesmas, kantor Desa, kantor Camat dan dimana saja, di radio, Koran, televisi semuanya memberikan informasi tentang KB.

Jadi proses penyuluhan KB seharusnya menyatu dengan pola interaksi sosial yang terjadi di suatu komunitas masyarakat, kuncinya adalah diinteraksi sosial itu kenapa karena memuat beberapa faktor komunikasi dan manajemen sumber daya manusia "Interaksi sosial akan membentuk paradigma atau pola pikir masyarakat" dengan demikian yang perlu kita perhatikan

adalah kemana saja interaksi sosial kelompok umur pasang usia subur (PUS) karena kelompok PUS merupakan usia-usia potensial maka bias dipastikan secara umum bahwa kelompok PUS merupakan kelompok yang memiliki frekuensi interaksi sosial yang tinggi, mobilitas yang tinggi karena berbagai sebab, bisa karena pekerjaan, karena lahan usaha, karena tempat tinggal dan lainnya.

Yang jadi persolan adalah apakah penyuluhan KB selama ini sudah selaras dengan interaksi sosial dan mobilitas sosial Pasangan Usia Subur ? ini jelas bias dipastikan belum ? kenapa ? karena untuk meyakinkan ber KB adalah merupakan proses belajar terus menerus dan sebelumnya mengambil keputusan akan selalu diliputi keraguan, ketakutan, kekhawatiran, was-was baik dari sisi harapan sosial masa depan keluarga maupun dari sisi medis. Orang ber KB itu dihadapkan pada dua dimensi tujuan yakni:

1. Tujuan masa depan yang berkaitan dengan sosial kesejahteraan dan
2. Tujuan kesehatan yang berkaitan dengan pilihan jenis kontrasepsi dan faktor resiko.

Sebagai suatu proses belajar tentunya bagi pengelola program KB di suatu wilayah kondisi seperti ini harus ditangkap sebagai tantangan, untuk mewujudkan suatu penyuluhan yang total dan komprehensif tidak hanya terpancang pada media dan

metode seras sebenarnya saja akan tetapi masih ada faktor yang sangat menentukan yakni penyuluh KB dan kader sebagai jaminan pendampingan selama belum ber KB sampai telah ber KB.

Penyuluh KB adalah merupakan petugas lapangan yang sangatmempuni di bidang keluarga berencana dan berkompeten,mereka ahli dalam berkomunikasi secara efektif dengan keluarga. Dengan demikian penyuluh KB dapat mendorong minat belajar PUS baik sebelum maupun sesudah ber KB, jangan sampai keluarga yang akan ber KB terbawa dengan kondisi yang orientasi pada masalah yang dihadapi oleh keluarga. Bagaimana metode atau model penyuluhan keluarga berencana yang diterapkan oleh penyuluh KB, kaitannya dengan peerencanaan Progran Penyuluhan, tentunya akan disusun oleh mereka sesuai dengan daya dukung manajemen diwilayah tersebut. Dilain pihak tidak selamanya penyuluh KB dalam langsung masuk ke area komunikasi dengan keluarga sasaran calon peserta KB, setiap keluarga pasti memerlukan agen-agen proses belajar yakni para kader-kader kelompok kegiatan, kader KB, Su PPKBD, PPKBD. Para agen penyuluh ( kader ) akan mendampingi calon peserta KBsaat akan memutuskan pilihannya. Ini merupakan karakteristik masyarakat di Indonesia yang sangat tinggi ikatan sosialnya,

artinya mengambil keputusan untuk keluarganya sendiri tapi memerlukan pendamping pihak lain yakni kader.

Jika kelompok sasaran sudah berada pada tahap akan mengambil keputusan biasanya sudah terlepas dengan isi pesan penyuluhan yang diterima dari berbagai media atau dari petugas manapun akan tetapi keluarga ini lebih ke memerlukan pendampingan medis, karena adanya kekhawatiran akan masa depan dan jika terjadi apa-apa.

Dengan demikian metode dan teknik penyuluhan KB di suatu wilayah hendaknya:

1. Menggunakan metode dan teknik yang lengkap kombinasinya disesuaikan dengan interaksi sosial dan mobilitas sosial Pasangan Usia Subur di wilayah tersebut
2. Mendayagunakan penyuluhan KB untuk memperkuat informasi mengenai; tujuan KB, manfaat KB, bahaya apa jika ber KB, dari aspek sosial kemasyarakatan maupun dari aspek medis.
3. Memperkuat dan medayagunakan agen-agen proses belajar yakni para kader kelompok kegiatan, kader KB, Sub PPKD, PPKBD karena para agen penyuluh (kader) akan mendampingi calon peserta KB saat akan memutuskan pilihannya. Dengan demikian pengetahuan, keterampilan, dan sikap penyuluh KB dan

para kader ini harus terus menerus ditambah agar bisa mendorong kearah perubahan.

Tema/isu pesan penyuluhan

Merencanakan tema/isu penyuluhan akan memberikan jaminan untuk menarik perhatian PUS

1. Pada masalah yang dihadapi oleh PUS
2. Hal-hal penting dalam membangun masa depan keluarga
3. Kepentingan nasional kaitannya dengan tujuan bernegara

Semua tema/isu penyuluhan KB disajikan dengan teknik penggabungan semua metode ini yang paling efektif dari pengalaman beberapa metode kali menyelenggarakan penyuluhan KB. Ini akan mempermudah dan meringankan tugas penyuluhan KB dan kader KB karena kegiatan penyuluhan KB dapat terintegrasi dan terorganisir secara efektif dengan berbagai kegiatan yang terjadi dimasyarakat selaras dengan interaksi sosial

Faktor pendukung pelaksanaan KB

Pertama : tingkat pendidikan, pasangan usia subur yang melakukan KB jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak memakai KB artinya tingkat pendidikan menjadi faktor pendukung dan penghambat untuk melaksanakan KB, hal ini

ternyata sesuai dengan pendapat Triatna (2004), pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam rangka aspeknya.

Kedua : tingkat pengetahuan pasangan usia subur, di mana pengetahuan yang melakukan KB lebih banyak tentang KB di bandingkan yang tidak melakukan KB, di mana pengetahuan ini akan menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat untuk melaksanakan KB, hal ini sesuai pendapat Notoatmodjo (2003) Pengetahuan merupakan hasil yang kita ketahui, dan ini terjadi setelah melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia yaitu indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba.

Ketiga : pencaharian atau pekerjaan pasangan usia subur terlihat di mana bahwa mata pencaharian ini sebagai faktor pendukung pelaksanaan KB, menurut Anwar (2010) mata pencaharian adalah corak kehidupan penduduk setempat berdasarkan lingkungantempat tinggalnya. Kehidupan penduduk dapat di bagi menjadi dua yaitu corak kehidupan tradisional (sederhana) dan corak kehidupan modern (kompleks).

Keempat : dukungan keluarga, panutan dari keluarga sangat penting dalam memberi motivasi dan dorongan untuk melakukan suatu kegiatan, terutama pada masyarakat pedesaan, dukungan keluarga menurut Soekidjo Notoatmodjo

(2003), menyatakan bahwa faktor lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang, terutama dalam memutuskan untuk kelangsungan hidupnya.

Kelima : peran suami, bahwa keadaan yang paling ideal adalah istri dan suami harus bersama-sama ikut dalam melakukan KB, hal ini sama dengan Hartanto (2004), Pembicaraan antara suami isteri mengenai KB tidak menjadi persyaratan dalam penerimaan KB, namun tidak adanya diskusi tersebut dapat menjadi halangan terhadap pemakaian alat kontrasepsi.

Keenam : kualitas pelayanan, kualitas pelayanan yang baik sangat penting di dalam pelayanan KB, menurut Wilopo (2004), Kebijakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) diarahkan untuk menjalin pasangan suami isteri agar memperoleh pelayanan kontrasepsi, yang berkualitas, bebas dari paksaan, berorientasi terhadap permintaan akseptor, pemberian pelayanan dan informasi yang dijamin kerahasiaanya, serta memilih jenis-jenis pelayanan sesuai dengan keinginan mereka.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan KB

Pertama : tingkat pengetahuan, pengetahuan merupakan hasil dari yang kita ketahui, dan ini terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu, Notoatmodjo (2003).

Kedua : budaya memerintahkan untuk memiliki banyak anak karena masyarakat masih percaya dengan istilah banyak rezeki, hal ini sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat (2000), bahwa kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Ketiga : tingkat pendidikan pasangan usia subur, menurut pendapat Priatna (2004), Pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam rangka aspeknya. Artinya pendidikan ini menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat untuk melaksanakan KB.

Keempat : faktor agama, pendapat Nasution (2000), mengatakan bahwa agama mengandung arti ikatan yang harus di pegang dan di patuhi manusia.

Kelima : tidak mau melakukan KB, Suaib (2010), mengatakan usia merupakan perhitungan seseorang seberapa lama ia sudah hidup di dunia ini, di mana usia di sini berpengaruh untuk melakukan KB, karena pasangan usia subur ini merasa terlalu muda atau terlalu tua untuk melakukan KB.

### **C. Peningkatan Kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah terciptanya kondisi keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan bathinia, indikator kesejahteraan keluarga adalah sebagai berikut ;

1. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sejahtera Tahap I, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologinya (socio psychological needs), seperti kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera Tahap 2, adalah keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan dasarnya juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologinya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhannya (developmental needs) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.

4. Keluarga Sejahtera Tahap 3, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologi dan kebutuhan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk materi dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.
5. Keluarga Sejahtera Tahap 3 Plus, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat pengembangan serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak dan atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

#### **D. Hubungan Penyuluhan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.**

Telah lama disadari bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan berbagai permasalahan, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial, beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu telah lama pula memikirkan hal tersebut. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan pemikiran para ahli, seperti ahli ekonomi dan ahli sosiologi.

Teori-teori tentang hubungan antara manusia atau penduduk dengan masalah-masalah lain telah banyak dibahas oleh beberapa ahli, seperti oleh ahli ekonomi, agama, sosial, politik, dan pertahanan. Konfusius, (500 tahun SM), seorang filsuf Cina, membahas hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, jumlah penduduk yang terlampau besar akan menekan standar hidup masyarakat, terutama kalau jumlah penduduk dikatkan dengan luas atau lahan pertanian yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Konfusius menganggap ada suatu proporsi yang ideal antara luas tanah dan jumlah penduduk. Sebagai pemecahannya masalah kelebihan penduduk, ia menganjurkan agar pemerintah memindahkan penduduk ke daerah yang masih kekeurangan penduduk. Plato dan Aristoteles, dua orang pemikir Yunani yang hidup di tahun 300 SM, menganjurkan jumlah penduduk yang tepat dan ideal

untuk sebuah kota, apabila sebuah kota tidak dapat menampung jumlah penduduk yang ada, maka diperlukan pembatasan kelahiran, sebaliknya jika terjadi kekurangan penduduk, maka diperlukan intensif (pendiring) untuk menambah kelahiran.

Teori ekonomi fertilitas yang termasuk dalam teori neoklasik, ini didasari oleh teori baru ekonomi rumah tangga (new home economics) yang berpendapat bahwa seseorang dalam menentukan fertilitas akan melalui proses yang sama dengan apabila ia memutuskan suatu pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa bagi keperluan rumah tangganya. Pilihan Fertilitas debatasi oleh jumlah dan sumber-sumber yang ada, namun keputusan mereka dalam memilih jumlah anak tetap rasional, dalam arti harus dapat memaksimumkan kesejahteraan mereka.

Indonesia sering dijadikan contoh keberhasilan penurunan angka kelahiran yang relatif cukup cepat, keberhasilan tersebut disebabkan adanya intervensi pemerintah melalui pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB), yang dilaksanakan sejak awal tahun 1970-an. Pemerintah pada waktu itu berkeyakinan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan penghambat bagi pertumbuhan ekonomi yang cepat, Oleh sebab itu, penurunan angka kelahiran merupakan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi

Gerakan Keluarga Berencana Nasional merupakan fase kedua dalam pelaksanaan kebijaksanaan keluarga berencana di Indonesia. Fase pertama adalah program KB yang orientasinya lebih kepada norma keluarga kecil. Orientasi dan tujuan gerakan keluarga berencana lebih ditekankan untuk menciptakan keluarga sejahtera.

Keberhasilan Gerakan Keluarga Berencana sejak awal pelaksanaannya hingga saat ini, tidak terlepas dari intensitas penyuluhan yang dilakukan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), yang telah memberikan pemahaman kepada keluarga dan masyarakat khususnya pasangan usia subur (PUS) yang belum berKB sehingga dapat menurunkan fertilitas, ternyata memiliki dampak yang cukup luas secara garis besar dampak tersebut meliputi aspek kultur, sosial, dan ekonomi. Salah satu dampak keberhasilan program KB dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yang menarik untuk dipelajari yaitu aspek ekonomi keluarga, dimana keluarga peserta KB mempunyai peluang untuk meningkatkan status ekonomi keluarganya, karena hanya melahirkan, memelihara, dan mendidik anak yang sedikit. Menurut Effendi dan Sukamdi (1994), turunnya fertilitas secara relatif mengurangi jumlah kelahiran, sehingga jumlah anak sedikit akan menurunkan keseluruhan biaya anak, dengan demikian peluang untuk mencapai keluarga sejahtera semakin besar.

Hasil capaian hubungan penyuluhan dan pembangunan keluarga sejahtera tidak terlepas dari peran yang dilakukan oleh pemerintah (BKKBN) melalui pendekatan penyuluhan yang dilakukan oleh para petugas lapangan KB yang ada di daerah wilayah kerja masing-masing. Dengan cara sebagai berikut

1. Tujuan dan Ruang Lingkup Sasaran.

1) Tujuan umum

Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat untuk mengejar ketertinggalannya dalam pembangunan keluarga sejahtera guna mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

2) Tujuan khusus.

- a) Meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki kondisi pemukiman dan lingkungan
- b) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan menambah penghasilannya.
- c) Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan lintas sektoral dan lintas program dalam pembangunan keluarga sejahtera.
- d) Meningkatkan tingkat pendidikan usia kawin wanita.
- e) Meningkatkan kesetaraan dan kemampuan ber-KB.

- f) Meningkatkan peran serta LSOM dalam pembangunan keluarga sejahtera.
  - g) Meningkatkan pelayanan KB/kesehatan serta pelayanan sosial lainnya yang terjangkau oleh masyarakat setempat.
- 3) Ruang lingkup sasaran.

1) Sasaran langsung

Keluarga, terutama yang meliputi :

a) Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I

b) Keluarga sejahtera I

Keluarga yang memenuhi syarat-syarat tersebut dibawah ini, yang tidak memenuhi syarat-syarat keluarga sejahtera II.

- Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah, dan bepergian.
- Bagian terluas dai lantai rumah bukan dari tanah.
- Bila anak sakit dibawah kesarana/petugas kesehatan atau diberi pengobatan modern.

Adapun syarat-syarat Keluarga Sejahtera II meliputi syarat-syarat tersebut diatas, ditambah dengan syarat-syarat berikut;

- Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk.
- Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru setahun terakhir.
- Luas lantai paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk tiap penghuni rumah.
- Seluruh anggota keluarga yang berumur dibawah 60 tahun dewasa ini bisa membaca tulis menulis.
- Seluruh anak berusia 6-12 tahun bersekolah pada saat ini.
- Paling kurang satu orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai pekerjaan tetap.
- Seluruh anggota keluarga dalam satu bulan terakhir dalam keadaan sehat, sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsinya masing-masing.
- Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur menurut agama yang dianutnya masing-masing.

Dari sasaran keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, yang perlu diprioritaskan adalah:

- Keluarga PUS muda dan peserta KB metode jangka pendek.
- Keluarga ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu resiko tinggi.
- Keluarga yang memiliki balita gizi kurang/buruk.
- Keluarga yang memiliki remaja putus sekolah.
- Keluarga yang memiliki anggota lanjut usia.

## 2) Sasaran antara

- Perangkat kelembagaan Gerakan KB Nasional.
- Lembaga swadaya dan organisasi masyarakat.
- Organisasi Profesi.
- Tokoh masyarakat dan tokoh agama.

## 2. Kebijakan dan Strategi

Pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera ditekankan pada kebijakan , strategi dan ruang lingkup sasaran sebagai berikut.

### 1) Kebijakan

Pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera perlu ditekankan pada kebijakan berikut :

- a) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga dan masyarakat akan pentingnya cara hidup yang sehat dan produktif bagi peningkatan kesejahteraan keluarga.

- b) Meningkatkan kemampuan para keluarga dalam membangun dirinya serta melaksanakan fungsi-fungsinya secara mandiri.
- c) Menumbuhkan dan mengembangkan solidaritas sosial dan semangat gotong-royong dalam pembangunan keluarga sejahtera melalui kelompok-kelompok kegiatan.
- d) Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan KB-metode jangka panjang, pelayanan kesehatan serta pelayanan kesejahteraan lainnya.
- e) Meningkatkan pembangunan keluarga sejahtera secara terpadu, dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan, serta serasi dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah setempat.
- f) Meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarga dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara gotong royong dan mandiri melalui peran serta LSOM dan perangkat kelembagaan gerakan KB.

## 2) Strategi

Dalam melaksanakan kebijaksanaan tersebut guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu digunakan strategi sebagai berikut :

1. Menyusaiakan materi, komunikator, media, serta waktu dan tempat KIE dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang khusus.
2. Mengusahakan bantuan pelatihan, sarana, dan permodalan untuk kegiatan UPPKS.
3. Menegembangkan sistem “ bapak angkat” dalam pembangunan keluarga sejahtera.
4. Melibatkan masyarakat setempat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan, serta pemeliharannya.
5. Memberikan bantuan kemudahan dalam menjangkau pelayanan KB, kesehatan dan kesejahteraan lainnya, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarganya, melalui dana sehat dan usaha koperasi.
6. Meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan sehingga menjadi pelayananyang berdaya guna, menyenangkan, dan terjangkau.
7. Melakukan koordinasi secara teratur dengan Pemerintah Daerah dan instansi sektoral setempat melalui wadah/forum yang ada.
8. Memberikan dukungan manajemen dan sumber daya kepada LSOM guna meningkatkan kemampuan peran sertanya secara mandiri/berlanjut.

9. Memberikan pembinaan yang terarah kepada perangkat kelembagaan gerakan KB yang ada agar mampu memberikan pelayanan yang terpadu dan mandiri.

### **3. Pokok –Pokok Kegiatan**

Pokok-pokok kegiatan yang dilaksanakan diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan keadaan dan masalah yang dihadapi, serta kebijaksanaan dan strategi yang telah digariskan. Secara garis besar pokok-pokok kegiatan dapat dikelompokkan dalam kegiatan KIE, Pelayanan KB, Keluarga Sejahtera, dan Peningkatan Peran serta Institusi Masyarakat.

- 1) Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
  - a) Materi KIE KB hendaknya lebih difokuskan kepada;
    - Mengubah pandangan orang tua tentang nilai anak.
    - Faktor-faktor yang menguntungkan perkawinan usia dewasa.
    - Menaggulangi kekhawatiran terhadap efek sampingan pemakaian kontrasepsi (terutama untuk metode jangka panjang).Materi KIE Kesehatan Dasar yang perlu diberikan meliputi ;
    - Kesehatan ibu dan anak
    - Perbaikan gizi

- Immunisasi dan pencegahan penyakit menular
- Penanggulangan diare
- Kesehatan lingkungan

Materi kesejahteraan keluarga lainnya yang sangat dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat antara lain;

- Motivasi tentang pentingnya mengikuti kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan koperasi.
- Informasi tentang adanya dana pinjaman dengan bunga yang ringan.
- Informasi tentang adanya lapangan kerja yang dibutuhkan.

b) Komunikator yang efektif adalah ;

- Kader setempat (orang dalam) yang dibekali dengan materi-materi KB, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya.
- Petugas medis, yang memberikan KIE secara melekat dan dapat member konseling yang tepat.
- PLKB serta petugas lain yang terlatih, termasuk petugas yang telah dibina oleh LSOM.

c) Media, pada dasarnya media yang banyak digunakan harus disesuaikan dengan media yang dimiliki atau dapat diterima oleh masyarakat, yang mungkin saja bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya.

- Media perorangan, yang merupakan media yang paling efektif dalam memberikan informasi yang bersifat khusus sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga.
- Media kelompok, seperti pengajian dan taman pendidikan Al Quran, dapat memberikan KIE yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
- Media massa, seperti radio, TV, dan unit penerangan mobil, bermanfaat untuk memberikan informasi yang bersifat umum.

## 2) Pelayanan KB dan Pelayanan Keluarga Sejahtera

### a) Jenis pelayanan

Kegiatan pelayanan yang diberikan dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian keluarga dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Pelayanan yang diberikan terdiri atas pelayanan KB yang dipadukan dengan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan lain yang dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat setempat. Pelayanan yang diberikan diharapkan tidak bersifat karitatif (kedermawanan), kecuali dalam keadaan darurat, karena pelayanan yang demikian akan berpengaruh negatif terhadap

semangat berusaha/kemandirian dan menimbulkan ketergantungan.

Pelayanan KB (kontrasepsi) perlu memperhatikan sasaran, anatar lain tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi PUS yang bersangkutan untuk memakai kontrasepsi yang ditawarkan secara efektif dan berkelanjutan. Pelayanan metode jangka panjang merupakan jenis pelayanan yang paling sesuai untuk PUS dengan cirri-ciri tersebut, namun demikian pelayanan IUD sering dikawatirkan efek sampingnya, sedangkan pelayanan Kontap dan Implant cukup mahal bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, perlu dicarikan jalan untuk mengatasi rasa khawatir dan membantu mereka dalam menggunakan metode-metode tersebut.

Pelayanan kesehatan yang dipadukan dengan pelayanan KB, hendaknya pelayanan yang dapat diberikan hasil nyata dalam waktu yang lebih cepat, seperti pelayanan kuratif, atau pelayanan preventif yang sudah diminati, seperti kesehatan ibu dan anak, sedang pelayanan kesehatan lain yang dianggap perlu dapat menumpang pada pelayanan kuratif/preventif tersebut.

Pelayanan kesejahteraan lainnya meliputi, anatar lain pemberi bantuan untuk penyehatan lingkungan serta pemugaran perekonomian, pemberian pinjaman modal untuk usaha ekonomi produktif, pelayanan koperasi untuk bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, tempat penitipan anak, dan sebagainya. Untuk menunjang pelayanan tersebut perlu diusahakan dukungan dari berbagai sumber, termasuk para pengusaha yang mempunyai kepedulian, sebagai "bapak angkat". Pelayanan tersebut dapat dipadukan dengan pelayanan KB/Kesehatan pada tempat yang berdekatan selama tidak menimbulkan hambatan dalam proses pelayanan itu sendiri.

b) Tenaga dan sarana pelayanan

Pelayanan KB/Kesehatan dan pelayanan keluarga sejahtera lainnya sedapat mungkin memanfaatkan tenaga dan sarana pelayanan setempat yang ada dengan sebaik-baiknya, dan membatasi penggunaan tenaga dan sarana pelayanan dari luar yang umumnya memakai biaya yang tidak sedikit.

Untuk pelayanan KB/Kesehatan professional yang bersifat statis dapat digunakan;

- Rumah sakit pemerintah maupun swasta
- Rumah bersalin, dan rumah sakit bersalin

- Puskesmas, dan puskesmas pembantu
- Poloklinik LSOM/ swasta maupun pemerintah serta
- Dokter / bidan praktek swasta.

Untuk pelayanan yang bersifat mobil dapat digunakan ;

- Tim KB keliling (TKBK)
- Mobil pelayanan keliling (pusling, klino, mobil)
- Visiting spesialis

Disamping itu dapat dimanfaatkan adanya kegiatan momentum khusus, seperti operasi manunggal KB-Kes-ARI,AMD, dan Kesatuan Gerak KB-Kes-PKK.

Untuk pelayanan non-profesional dapat dimanfaatkan tenaga PPKBD, Sub PPKBD, kelompok akseptor,POD dan PAKBD setempat.

Untuk pelayanan kesejahteraan lainnya dapat digunakan sarana ;

- Tempat pelayanan UPPKS atau usaha sejenis lainnya.
- Tempat pelayanan koperasi (TPK) setempat
- Tempat penitipan anak (TPA) bagi ibu yang bekerja diluar
- Tempat pelayanan lainnya sepertiPosyandu, BKB

3) Peningkatan peran serta institusi masyarakat.

Institusi masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pembangunan keluarga sejahtera. Peranan yang dapat diberikan bersifat luas dan perlu disesuaikan dengan ciri dan kemampuan institusi tersebut. Disamping itu, upaya untuk meningkatkan kemampuan institusi sangat penting bagi peningkatan peran sertanya. Institusi masyarakat yang mempunyai potensi perlu ditingkatkan peran sertanya adalah perangkat kelembagaan KB (PPKBD, Sub PPKBD, dan kelompok akseptor), organisasi profesi (IDI, IBI, ISFI, dan sebagainya), organisasi wanita (PKK, Dharma wanita, dan sebagainya), organisasi pemuda misalnya (karang taruna, pramuka, remaja masjid), LSOM (LKKNU, Muhammadiyah, dan lain-lain) serta institusi masyarakat lainnya (LKMD).

a) Perangkat kelembagaan KB.

Perangkat kelembagaan tersebut perlu dikembangkan keseluruhan keluarahan, RW,RT, dan kelompok Dasa-Wisma, disamping itu kemampuannya dalam memberikan pelayanan terpadu dan melaksanakan usaha-usaha kemandirian perlu ditingkatkan agar kelangsungan ber-KB dan upaya peningkatan kesejahteraan keluarganya dapat terus ditingkatkan.

b) Organisasi profesi

Kepedulian kesertaan organisasi yang menghimpun tenaga-tenaga profesional untuk berkarya, perlu dikembangkan dan dipelihara secara terus menerus. Pengembangan tersebut perlu diarahkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan dan memberikan pelayanan yang terjangkau kepada masyarakat yang kemampuannya terbatas.

c) Organisasi wanita

Peran serta organisasi wanita dalam Gerakan KB Nasional sudah cukup dikenal. Kemampuan organisasi ini dalam mengerahkan peran serta kaum wanita dalam pembangunan keluarga sejahtera perlu diarahkan kepada peningkatan kemampuan kaum wanita dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.

d) Organisasi pemuda

Peran serta organisasi pemuda dalam pembangunan keluarga sejahtera adalah ikut menyiapkan generasi muda dalam menyongsong hari depannya serta membantu orang tua mereka dalam keterbatasannya. Untuk maksud tersebut perlu diberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan serta sikap mental yang positif dengan dukungan upaya pendewasaan usia perkawinan.

- e) Lembaga swadaya dan organisasi masyarakat (LSOM)
- Lemabaga swadaya dan organisasi masyarakat diluar institusi masyarakat yang disebutkan diatas mempunyai peranan untuk memadukan berbagai potensi yang dimilkinya untuk member pelayanan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Untuk maksud itu LSOM tersebut perlu mengadakan identifikasi terhadap kebutuhan dan keinginan tersebut, serta menggali sumber daya ( tenaga, dana, sarana ), dari masyarakat, yang pada gilirannya dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. LSOM tersebut juga perlu bekerja sama dengan LSOM/institusi lain yang memiliki kemampuan khusus.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000. *Analisa Pencapaian Program Keluarga Berencana Nasional s/d Bulan Agustus Tahun 2000*, BKKBN Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar.
- Anonim, 1979 *Lokakarya Komunikasi dan Edukasi Dalam Bidang Sterilisasi Sukarela*, Kumpulan Untuk Sterilisasi Sukarela Indonesia, Jakarta.
- Anonim, 1982 *Informasi Dasar Program Kependudukan Keluarga Berencana Nasional*, Biro Data Kependudukan, Jakarta.
- Anonim, 1982 *Pelebagaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Keluarga Indonesia Menyambut Tahun 2000*, Biro Penerangan dan Motivasi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

- ,1985 *Pedoman Tata Kerja Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)*, Deputi Bidang Pembinaan Operasional Program, Jakarta, Indonesia.
- Anonim, 1992 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992, Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Jakarta.
- 1993 *Petunjuk Teknik Pendataan dan Pemetaan Keluarga Sejahtera, Gerakan Keluarga Berencana Nasional*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- 1995 *Materi Lokakarya Pengembangan Strategi dan Intervensi KIE Dengan P-Proses*, Bogor, Indonesia.
- 1995 *Pendapatan Umum Tentang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Kependudukan*, Kantor Menteri Negara Kependudukan / Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta.
- Anonim, 1999 *Profil Kependudukan Propinsi Sulawesi Selatan*, BPS Propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- 1999. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Propinsi Sulawesi Selatan*, BPS Propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- 1999 *GBHN Tahun 2003*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Anonim, 1999 *GBHN 1999-2004*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

- 2000 *Statistik Sosial dan Ekonomi Rumah Tangga Sulawesi Selatan 1999*, BPS Propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- Abimanyu Soli. Dkk, 1988. *Pengantar Bimbingan-Konseling dan Psikologi*, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP, Ujung Pandang.
- Abustam, Muhammad Idrus, 1989. *Gerak Penduduk, Pembangunan dan Perubahan Sosial*, UI-Press, Jakarta.
- Adioetomo, Sri Moertiningsih, dan Omas Bulan Samosir. *Dasar-Dasar Demografi*, Edisi dua, Penerbit Salemba Empat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ananta, Aris (Penyunting), 1995. *Kecenderungan dan Faktor Penentu Fertilitas dan Moralitas di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Kependudukan / BKKBN, Jakarta.
- (Penyunting), 1995. *Transisi Demografi, Transisi Pendidikan, dan Transisi Kesehatan di Indonesia*, Kantor Menteri Negara Kependudukan / BKKBN, Jakarta.
- (Penyunting), 1993. *Ciri Demografi Kualitas Pendu Pembangunan Ekonomi*, Lembaga Demografi Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

- \_\_\_\_\_ dkk, 1995. *Beberapa Implikasi Perkembangan Penduduk Indonesia Dalam PJP II*, Kantor Menteri Negara Kependudukan / BKKBN, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dkk, 1988. *Beberapa Skenario Ketenagakerjaan Indonesia 1990*, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bulaeng, A.R, 1999. *Program dan Kegiatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Tahun 1999-2000 (Makalah)*.
- Bulaeng, A.R, 2000. *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer*, Hasanuddin University Press, Makassar.
- Dwiyanto Agus, dkk, 1996. *Penduduk dan Pembangunan*, Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gaja Mada, Yogyakarta.
- Dahlan, M. Alwi, 1993. *Menjelang Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus. 1996. *Penduduk dan Pembangunan*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1989. *Metedologi Research*, Jilid dua, Yayasan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Mantra, Ida Bagus, 1985. *Pengantar Studi Demografi*, Nur Cahaya, Yogyakarta.
- Mustakim Nur, M, 2015, Pengaruh intensitas penyuluhan dan tingkat pengetahuan terhadap persepsi peternak pada

teknologi biogas di desa patalassang kecamatan  
tompobulu kabup;aten. enrekang

Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Putri eka masridayanti, dkk, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program keluarga berencana di Nagari Padang Mentinggi Kabupaten Pasama

Sugiyono, 1999. *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan kedua, Alfabeta, Bandung.

Suratmo, F. Gunawan, 1991. *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan keempat, Gajah Mada Press, Yogyakarta.

Singarimbun, Masri, 1996. *Penduduk dan Perubahan*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_ 1995. *Metode Penelitian Survey*, Edisi Revisi, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

\_\_\_\_\_ 1990. *LSM Kependudukan dan Keluarga Berencana Tantangan Masa Depan*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.

Soerjani, Moh, dkk, 1987. *Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Universitas Indonesia, UI-Press.

- Suhardi, Dewa Ketut. *Pengantar Teori Konseling*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sastraatmadja Entang, 1993. *Penyuluhan Pertanian*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Surahmat Winarno, 1970. *Pengantar Penyelidikan Ilmiah (Research) Dasar dan Metode*, CV Jamros, Bandung.
- 1994. *Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Sejahtera Di Daerah Masyarakat Tertinggal Di Perkotaan*, Kantor Menteri Negara Kependudukan / BKKBN.
- 2016. *Petunjuk Tekhnis Lorong KB/Kampung KB Pemerintah Kota Makassar*, Badan Keluarga Berencana Kota Makassar.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Ahmad Syaekhu**, lahir di Pangkep, 23 Maret 1971, masa kecilnya di kampung Tala Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang, 12 Km jaraknya dari Kota Pangkep.

Penulis mengawali Pendidikan formal di SDN 4 Tala dan lulus pada tahun 1984 kemudian di MTsN Tala, lulus pada tahun 1987, selanjutnya di SMA Negeri 9 Ujung Pandang, dan lulus pada tahun 1990. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, kemudian Penulis melanjutkan pendidikannya pada pendidikan tinggi dan berhasil menempuh gelar sarjana (S.Pd.) di Pendidikan Luar Sekolah, Unismuh pada tahun 1996 dan magister (M.Si.) pada Jurusan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kekhususan Kependudukan Sumber daya Manusia, Universitas Hasanuddin pada tahun 2002.

Pada usia 20 tahun, tepatnya setelah menyelesaikan Pendidikan SMAnya, Penulis terangkat menjadi PNS pada BKKBN sebagai Asisten Penyuluh KB Muda. Pada tahun 1997,

penulis memperoleh piagam tanda penghargaan dari Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN sebagai Pengelola Gerakan KB Nasional Teladan Kabupaten Pangkep. Tahun 2008, Penulis pindah tugas ke kantor Gubernur Provinsi Sulawesi selatan dan Pada tahun 2010 s.d. 2014, penulis diberi amanah jabatan eselon IV. Kemudian. Pada tahun 2014, penulis pindah tugas ke Kemenristekdikti Kopertis Wilayah IX sebagai dosen PNS DPK (dosen PNS yang diperbantukan di PTS) dengan jabatan lektor.

Beberapa Karya Ilmiah yang telah penulis publikasikan (1) Jurnal Internasional IJRMPS dengan judul "Employee Performance Analysis at Community Service Unit in Makassar City", (2) Jurnal Intenational IJSDR dengan judul "Local Wisdom of Fishery Community Pattorani in Takalar, Indonesia" (3) Jurnal Nasional Terakreditasi (JIIAP) dengan judul "Pengaruh Kepribadian dan Komunikasi Interpersonal terhadap Komunitas Organisasi.